YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS JALAN DI KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

AULIA DHARMAWAN
NPM : 167310549

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU
2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama	:	Aulia Dharmawan
NPM	:	167310549
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	:	Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 8 Februari 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing,

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama	:	Aulia Darmawan
Npm	:	167310549
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	:	Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Selatan Kota Dumai.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan Menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 10 Juni 2021

Ketua

Dr.H.Rahyunir Rauf, M.Si

An. Tim Penguji

Sekretaris

Data Wardana, S.Sos., M.IP

Anggota

Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Mengetahui

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Aulia Darmawan
Npm	:	167310549
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	:	Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Selatan Kota Dumai.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 10 Mai 2021

Ketua	An. Tim Penguji Sekretaris
Dr. H . Rahyunir Rauf ., M.Si	**Data Wardana, S.Sos., M.IP**

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I	Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Indra Safri, S.Sos., M.Si	**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Sos., M.Si**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul "Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai".

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan studi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selalu turut memberikan pengarahan kepada penulis dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan membagikan ilmunya sehingga penulis bisa meyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan mengarahkan serta memberikan dorongan serta arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Staf, Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan segala urusan administrasi mengenai keperluan penulis yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.
7. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian serta memberikan informasi yang akurat serta respon yang sangat baik.
8. Kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda (alam) dan Ibunda terkasih yang telah memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9. Keluarga besar mahasiswa Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016 yang selama ini menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan Studi di Universitas Islam Riau.

Dalam penyusunan naskah skripsi ini, banyak hambatan dan tantangan yang penulis temui. Oleh karena itu, apabila pembaca menemukan kesalahan dan kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna koreksi dan penyempurnaan skripsi ini ke depannya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 8 Februari 2021
Penulis
Ttd.

Aulia Dharmawan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 22
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 23
1. Tujuan Penelitian 23
2. Kegunaan Penelitian 23

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR 24
A. Studi Kepustakaan 24
1. Konsep Ilmu Pemerintahan 24
2. Konsep Pemerintahan Daerah 27
3. Konsep Organisasi 29
4. Konsep Manajemen dan Manajemen Pemerintahan 32
5. Konsep Koordinasi 35
6. Konsep Kinerja 38
B. Penelitian Terdahulu 44
C. Kerangka Pikir 46
D. Konsep Operasional 47
E. Operasional Variabel 49
F. Teknik Pengukuran 49

BAB III : METODE PENELITIAN 52
A. Tipe Penelitian 52
B. Lokasi Penelitian 52
C. Populasi dan Sampel 53
D. Teknik Penarikan Sampel 53
E. Jenis dan Sumber Data 54

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Teknik Pengumpulan Data 55
G. Teknik Analisis Data 56

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 57
A. Gambaran Umum Kota Dumai 57
B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai 61
1. Profil Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai 61
2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai 64
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai 65
4. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai 66

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 69
A. Identitas Responden 69
1. Jenis Kelamin 69
2. Tingkat Pendidikan 70
3. Tingkat Usia 71
B. Hasil Penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai 72
1. Kualitas Kerja 72
2. Kuantitas Kerja 76
3. Pelaksanaan Tugas 79
4. Tanggung Jawab 83
C. Faktor Penghambat Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai 92

BAB VI : PENUTUP 94
A. Kesimpulan 94
B. Saran 95

DAFTAR KEPUSTAKAAN 97
LAMPIRAN 100

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

I.1 : Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Kecamatan di Kota Dumai 14

I.2 : Kondisi Jalan Raya di Kecamatan Dumai Selatan 17

II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai 49

III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai 40

V.1 : Distribusi Identitas Responden Dalam Penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Berdasarkan Jenis Kelamin.. 69

V.2 : Distribusi Identitas Responden Dalam Penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 70

V.3 : Distribusi Identitas Responden Dalam Penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Berdasarkan Tingkat Usia.... 71

V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Pengguna Jalan Mengenai Indikator Kualitas Kerja Terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai 73

V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Pengguna Jalan Mengenai Indikator Kuantitas Kerja Terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai 76

V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Pengguna Jalan Mengenai Indikator Pelaksanaan Tugas Terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai 80

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Pengguna Jalan Mengenai Indikator Tanggung Jawab Terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai 84

V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pengguna Jalan Terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai 91

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

I.1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjan Umum Kota Dumai 9

II.1 : Bagan Kerangka Pikir Penelitian Tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai 46

IV.1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjan Umum Kota Dumai 67

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Daftar Kuisioner untuk Pengguna Jalan tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai 100

2. Daftar Wawancara untuk Pegawai Dinas Pekerjaan Umum tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai 106

3. Daftar Telly Penelitian tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai 108

4. Foto Dokumentasi Penelitian tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai..... 110

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konperehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Aulia Dharmawan
NPM	:	167310549
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Menigkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengaju pada kaedah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persaratan administratif, akademika dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melangar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyatan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Februari 2021
Pelaku Pernyataan,

Aulia Dharmawan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS JALAN DI KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI

ABSTRAK

Oleh
Aulia Dharmawan

Kata Kunci : Kinerja, Dinas Pekerjaan Umum, Kualitas Jalan;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dan juga mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Indikator yang digunakan meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Tipe penelitian yang berlokasi di Kota Dumai ini adalah dengan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif. Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada 33 orang responden. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik kuesioner, teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai sudah cukup baik. Faktor penghambatnya yaitu Dinas Pekerjaan Umum memiliki keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Kemudian banyaknya kendaraan besar yang sering melewati jalan raya di Kecamatan Dumai Selatan seperti bus dan truk angkutan berat, sehingga menyebabkan jalanan menjadi rusak seperti amblas, retak dan berlubang. Selain itu kerusakan jalan di akibatkan adanya tempat peristirahatan para pengemudi truk bertonase besar dan tedapat pula bengkel di daerah tersebut, sehingga para pengemudi truk tersebut memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, akibatnya jalan menjadi amblas. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai tidak melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mencegah terjadinya kerusakan jalan. Padahal Dinas Perhubungan dapat melakukan pengamanan terhadap truk yang bermuatan melebihi kapasitas, dan truk yang parkir di bahu jalan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

THE PERFORMANCE OF THE PUBLIC WORKS SERVICE IN IMPROVING ROAD QUALITY IN SOUTH DUMAI DISTRICT DUMAI CITY

ABSTRACT

By
Aulia Dharmawan

Keywords : Performance, Public Works Department, Road Quality;

This study aims to determine and analyze how the Performance of the Public Works Service in Improving the Quality of Roads in South Dumai District, Dumai City and also to find out what obstacles are faced in the Performance of the Public Works Office in Improving Road Quality in Dumai Selatan District, Dumai City. The indicators used include quality of work, quantity of work, implementation of duties and responsibilities. This type of research which is located in Dumai City is a descriptive quantitative research method. This research method was used to examine 33 respondents. Collecting data using observation techniques, questionnaire techniques, interview techniques and documentation. The results showed that the performance of the Public Works Office in Improving the Quality of Roads in South Dumai District, Dumai City was quite good. The inhibiting factor is that the Public Works Office has limited budget, limited human resources, and lack of facilities and infrastructure owned by the Highways Division of the Public Works Office in improving the quality of roads in Dumai Selatan District, Dumai City. Then there are many large vehicles that often pass the highway in South Dumai District, such as buses and heavy trucks, causing the roads to become damaged such as collapsing, cracks and potholes. In addition, the road damage was caused by the resting place of large tonnage truck drivers and there were also workshops in the area, so that the truck drivers parked their vehicles on the shoulder of the road, as a result the road collapsed. The Public Works Office of Dumai City did not coordinate with the Dumai City Transportation Office in preventing road damage. In fact, the Department of Transportation can provide security for trucks that are overloaded and trucks parked on the shoulder of the road.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas Kabupaten/Kota tiap Provinsi. Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman Daerah.

Desentralisasi merupakan langkah pemerintah Indonesia yang sekarang sedang diterapkan. Dalam hal ini pemerintah daerah yang mengatur dan megurus sendiri urusan daerahnya, sesuai dengan azas otonomi daerah yang telah diberikan pemerintah pusat yang bertugas untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pembangunan infrastuktur, pemberdayaan serta partisipasi masyarakat.

Selain dari pada itu, pemerintah daerah juga harus meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan pembangunan, keadilan, keistimewaan dan ciri khas suatu daerah tersebut dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luasnya wilayah indonesia menjadi salah satu alasan adanya keharusan dalam menata administrasi hingga pada suatu wilayah terkecil.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar dari sabang hingga ke marauke,oleh kareana itu maka mempermudah penyelenggaran pemerintah di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Seperti yang dijeals kan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, dimana setiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang.

Dilihat dari pembangunan daerah saat ini bukan semata-mata hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, melain kan pemerintah pusat ikut serta dalam pelaksanaan dan mewujudkan pembangunan sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 bahwa pemerintahan pusat adalah presiden republik indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah dengan republik indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan mentri dan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar 1945.

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (2) pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yg memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur pemerintahan daerah.

Urusan pemerintah adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh kementrian negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi, melayani,meperdayakan dan mensejahteraan masyarakat. Otonomi daerah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system negara kesatuan republik indonesia.

Adapun urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibedakan atas dua jenis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9, yaitu :

1. Urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum.
2. Urusan pemerintah absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintah yang sepenuh nya menajadi kewenangan pemerintah pusat.
3. Urusan pemerintah konkuren sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintah konkuren yang diseah kan ke daerah menjadi dasar pelaksaan otonomi daerah.
5. Urusan pemerintah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Asas otonomi daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi. Dekonsenterasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan pusat kepada gebenur sebagai wakil pemerintahan pusat, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, dana atau kepada gebernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pelaksanaan otonomi daerah dengan menganut asas desentralisasi seperti yang diamanatkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 pemerintah daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luas nya dalam sistim prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesa tahun 1945.

Di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa negara kesatuan indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) dikatakan daerah kabupaten/kota dibagi atas kelurahan dan desa.

Berdasrkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah provinsi dan kabupatn/kota ditetapkan melalui Peratran Daerah dengan bentuk sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah Provnsi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.
b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota : Sekretarat Daerah, Sekretariat DPRD, Nas dan Badan.

Pembentukan organisasi perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan diklasfikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecl). Penentuan beban kerja bagi Dinas didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masng-masing

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenagan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerntahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerntahan Pilihan. Sedangkan besaran beban kerja pada Badan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.

Pemberian Nama/nomenkatur Dinas dan Badan disasuikan dengan perumpunan dan klasifkasi yang telah ditentukan. Perumunan urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas terdiri dari:

1. Bidang pendikan, pemuda dan olahraga;
2. Bidang kesehatan;
3. Bidang sosiol, tenaga kerja dan tranmigrasi;
4. Bidang perhubungan, komunikasi dan informatka;
5. Bidang kependudukan dan catatan sipil;
6. Bidang kebudayaan dan parwisata;
7. Bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengaran, cipta karya dan tata ruang;
8. Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagagan;
9. Bidang pelayanan pertahahan;
10. Bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, petenakan, perikanan darat, kelautan dan perikan, perkebunan dan kehutanan;
11. Bidang pertambagan dan energi; dan
12. Bidang pendapatan, pengelolan keuangan dan aset.

Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
2. Bidang penelitian dan pengembangan;
3. Bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
4. Bidang lingkungan hidup;
5. Bidang ketahanan pangan;
6. Bidang penanaman modal;
7. Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;
8. Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
9. Bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
10. Bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
11. Bidang pengawasan; dan
12. Bidang pelayanan kesehatan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 Bagian Kedua Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 8 Tugas Dinas meliputi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayananumum;
c. Pembinaan terhadap Unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Bagian Kedua Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten/kota mendirikan organisasi perangkat daerah berupa Dinas Pekerjaan Umum, hal ini di perkuat dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

Secara kelembagaan, eksisthensi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengalami penguatan karena secara eksplisit mengemban amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pekearjaan Umum Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi bagaimana kondisi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai saat ini, bagaaimana kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dan bagaimana cara mencapai kondisi yang diinginkan dalam melaksanakan tugas sebagai pelakasana teknis menghadapi pekerjaan secara akumulatif makin bertambah. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai saat ini di kepalai oleh Zulkarnain.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sebagai institusi teknis yang melaksanakan pembangunan daerah ditunutut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunuan daerah sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam melaaksanakan implementasi teknis pembangunan dan sebagai faktor kunci dari pencapaian tujuan-tujuan pembangunn.

Dalam megantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan organisasi sesuai dengan tuntutan paradgma baru pembangunan maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai menyatakan Visi sebagai berikut: *"Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Sarana Ke PU-an handal berhasil guna serta berwawasan Lingkungan menuju Kawasan Industri yang Maju dan Unggul".*

Visi tersebut di atas adalah merupakan suatu gambaran masa depan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diinginkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sebagai suatu lembaga teknis pembangunan daerah yang mmpunyai tugas dan fungsi guna mewujudkan Prasarana dan Sarana yang berhasil guna dengan memperhatikan atau menjaga lingkungan sekitarnya menuju kawosan industri yang maju dan unggul.

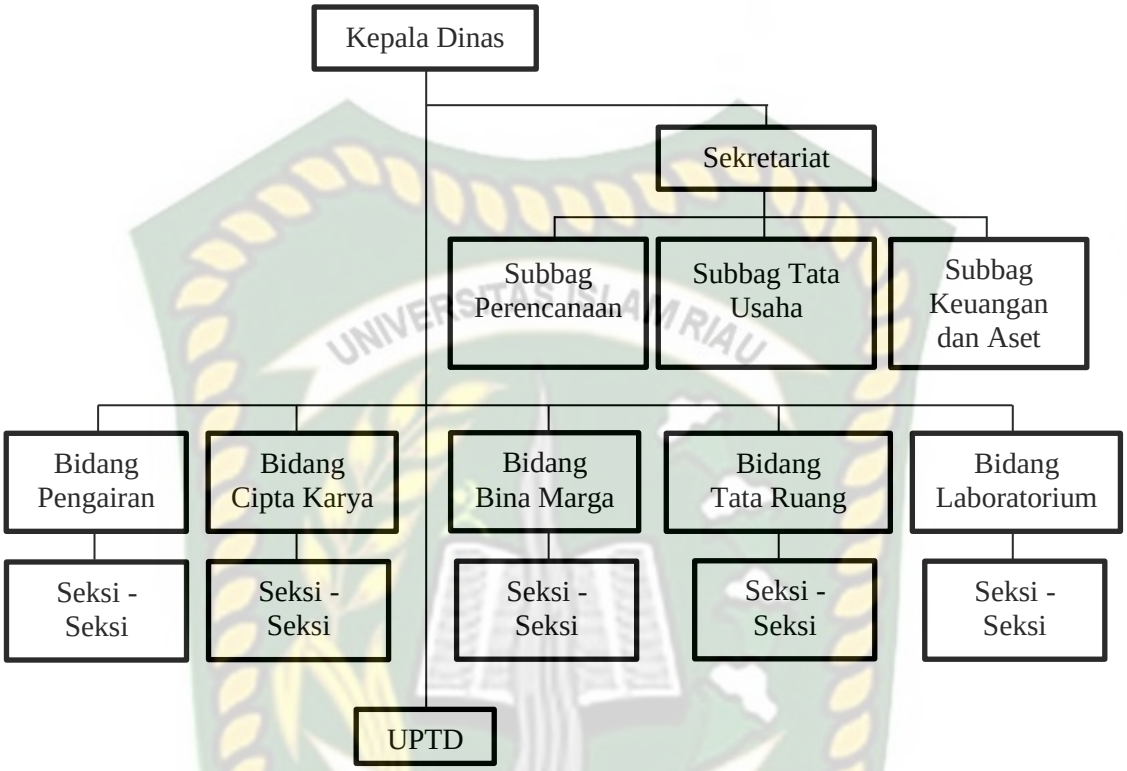
Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum maka dirumuskan Misi. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mengidentifikasi apa dan untuk siapa organsasi serta produk teknis apa yang dihasilkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum maka dirumuskan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sebagai berikut:

1) Mewujudkan Prasarana dan Sarana ke PU-an yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata dengan bertumpuk pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat seraya melibatkan seluruh stakeholder.
2) Memwujudkan lingkungan yang nyaman dan aman dicapai melalui tersedianya prasarana dasar dengan terpenuhi kebutuhan masarakat.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, adapun gambar bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar I.1: Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjan Umum Kota Dumai



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, 2021.

Berdasarkan gambar diatas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mempunyai lima bidang. Selanjutnya adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalian di bidang Pekerjaan Umum sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mempunyai fungsi :

1) Sekretariat mempunyai tugas merncanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2) Bidang Pengairan mempuyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanan tugas Bidang Pengairan.
3) Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi ptunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga.
4) Bidang Tata Ruang mempnyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanan tugas Bidang Tata Ruang.
5) Bidang Cipta Karya mepunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyeliat, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya.
6) Bidang Laboratorium mmpunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanan tugas Bidang Laboratorium.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dandi kembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Bagian Kedua Tentang Jalan pada Pasal 9 Ayat (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Dan pada ayat (4) Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Peraturan Pemearintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 1 tentang jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuak bangunan pelengkap dan perlengkapanya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di baawah permukaan tanah dan/atau air, serata di atas permukaan air, kecuali jaalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan di negara Indonesia terbagi menjadi tiga macam yaitu jalan negara/nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Jalan nasional adalah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jalan arteri dan jalan kalektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Kemudian jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam system jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Sedangkan jalan kabupaten/kota adalah jalan lokal dalam system jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Jalan nasional merupakan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kemudian jalan provinsi merupakan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sedangkan jalan kabupaten/kota merupakan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Kualitas jalan adalah sebuah makna yang bagi penyelenggara jalan merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik agar tercipta kepuasan bagi masyarakat atau pengguna jalan. Jalan yang berkualitas adalah jalan yang dibuat dengan material yang bagus dan memenuhi standar, kemudian dibuat dengan teknik yang baik dan berkelas, dibuat oleh orang-orang yang sudah berpengalaman dan didampingi oleh ahlinya, serta menghasilkan bentuk jalan yang sesuai dengan yang diharapkan serta tahan lama.

Selanjutnya jalan rusak adalah sebuah jalan dengan kondisi yang tidak layak di konsumsi oleh publik, biasanya bentuknya jalannya sudah hancur,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berlubang, bergelombang, retak-retak, serta punah ranah. Jalan rusak biasanya rawan terjadi kecelakaan bagi pengendara yang melintas dijalan tersebut.

Selanjutnya jalan aumum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Pada dasarnya Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakaan agar jalan dapat digunakan asebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi aserendah-rendahnya (PPRI 34/2006, pasal 4).

Sesuai dengan pasaal 4 tersebut diatas terlihat bahwa penyelengagaraan jalan ini bertujuan untuk maeningkatkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasioanal, tapi saat ini peningkatan kemakmurana rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasaional dirasa akan terhambat karena saat ini banyak terjadi kerusakan di jalan araya dan jika ini dibiarkan berlaraut-larut tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kerausakan ini akan menghambat peningkatan-peningkatan tersebut.

Dalam masalah ini penyebab kerusakan jalan disebabkan oleh beban roda kendaraan berat yang lalu lalang (baaerulang-ulang), kondisi muka air tanah yang tinggi, akibat dari salah pada waaktu pelaksanaan, dan juga bisa akibat kesalahan perencanaan. Dengan berabagai penyebab kerusakan ini tentu masyarakat akan semakin tahu bahwa kearusakan ini disebabkan oleh beban roda kendaraan yang berat yang sering berlaalu lalang, pada umumnyaa perkerasan dapat digunakan untuk memikul beban laalu lintas, tapi jika bebana ini berlebih (*over loading*), maka yang terjadi adalah perkerasan jalan rayaa akan rusak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebelum waktunya. Dan kerusakan ini akaan menimbulkan kerugian besar untuk memperbakinya.

Kota Dumai memiliki 7 kecamatan yang membutuhkan infrastuktur berupa jalan sebagai sarana penghubung antara ibukota kecamatan ke ibukota kecamatan atau ke ibukota kabupaten, menggerakkan roda perekonomian dan pelayanan terhadap masyarakat namun hal ini tidak sebanding dengan kebutuhan kualitas jalan untuk mendukung segala urusan di Kota Dumai. Terdapat jalan yang rusak bahkan membahayakan pengguna jalan, total keseluruhan jalan di Kota Dumai mecapai 1.561.24 Km dan jumlah jalan rusak berat yaitu 154.19 Km. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.1 : Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Kecamatan di Kota Dumai

No	Kecamatan	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (Km)				
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
1	Bukit Kapur	77.57	51.04	26.17	16.89	289.77
2	Medang Kampai	143.13	87.86	40.37	21.50	330.63
3	Sungai Sembilan	62.56	39.14	58.84	57.60	349.08
4	Dumai Barat	92.07	21.53	32.51	34.47	199.98
5	Dumai Selatan	99.68	11.62	9.70	11.41	248.16
6	Dumai Timur	95.65	26.63	9.89	10.14	95.68
7	Dumai Kota	51.10	5.04	2.94	2.18	47.94
Total		**620.76**	**242.86**	**180.42**	**154.19**	**1.561.24**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kota Dumai terdiri dari tujuh kecamatan, dengan total panjang jalan berjumlah 1.561.24 km. Adapun panjang jalan dengan kondisi rusak ringan berjumlah 180.42 km, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak berat berjumlah 154.19 km. Dari data diatas maka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dapat disimpulkan bahwa kondisi jalan di Kota Dumai sudah banyak yang rusak. Dalam penelitian ini, penulis memilih fokus penelitian hanya pada Kecamatan Dumai Selatan, alasannya yaitu karena lokasi ini lebih mudah di jangkau.

Kasus kerusakan jalan yang terjadi di Kecamatan Dumai Selatan terjadi karena beban roda kendaraan yang berlalu lalang berlebihan dan air hujan yang sering turun dan membuat tingkat kekerasan jalan semakin leamah dan akhirnya jalan pun amblas dan berlubang. Dalam menangani kerusakan ini, sering terlihat bahwa pemerintah setempat hanya melakukan penambalan terhadap jalan raya yang berlubang, padahal penambalan ini tidak baik jika diapergunakan untuk kerusakan yang dianggap parah atau rusak berat. Jika pada amusim penghujan datang, maka akan sering terlihat jalanan raya mengalami kerausakan yang lebih parah mulai dari sekedar retak buaya, atau bahkan sampai genaangan kerbau.

Hal ini disebabkan karena daya dukung tanah pada badan jalan sangat dipengaruhi oleh kandungan air yang ada dalam tanah tersebuta. Jika kandungan air optimum sudah terlewati maka daya dukung tanah akan menaurun, apalagi jika sampai muka jalan tergenang maka kondisi *saturated* akan aterjadi. Daya lekat antar butiran tanah menjadi sangat kecil bahkan bisa tidak ada sama sekali, gesekan antar partikal sangat menurun dan saling mengunci antar abutiran sudah tidak bekerja. Pada kondisi ini kemampuan tanah mendukung bebaan boleh dikatakan sangat-sangat kecil. Sedangakan kendaraan tetap akaan lewat, akibat beban kendaraan yang menekan muka jalan maka terjadilah pelepasan ikatan antar butiran pada tanah, dan akan mengakaibatkan permukaan jalaan menjadi pecah dan ambelas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kerusakan jalan ini seperti berupa retak-aretak (*cracking*), berupa gelombang (*corrugation*), juga kerusakan berupa alur/acekungan arah memanjang jalan sekitar jejak roda kendaraan (*rutting*) aada jugak berupa genaangan aspal dipermukaan jalan (*bleeding*), dan ada juga berupa lubang-lubang (*pothole*).

Dari kerusaakan jalan tersebut menimbulkan dampak bagi kalangan umum pengguna jalan. Kerusakan jalan raya ini mengganggu keanyamanan pengguana jalan raya, karena pada dasarnya karena kerusakan ini akan mengakiabatkan kemacetan, dan apalagi saat hujan deras mengguyur kawasan rusak ini,a air akan menggenang dan menutupi jalan rusak (beralubang), dan akhirnya masyarakat menjadi cemas dan was-was. Kecemasan dan kemacetan inilah yanag dimaksud menganggu kenyamanan pengguna jalan. Hal ini melanggar ahak masyarakat untuk mendapatkan jalan yang layaak dan sangat membahayakaan pengguna jalan.

Selain itu kerusakan jalan ini bisa mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Semakin padatnya lalu lintas di jalan raya tidak biasa dipungkiri bahwa kepadaatan ini mengakibatkan kecelakaan, apalagi jika jalan rusak dan didukung dengan ketidak hati-hatian pengguna jalan, bisa dipaastikan akan menambah nilaia kecelakaan.

Kecamatan Dumai Selatan memiliki panjang jalan dengan total berjumlah 248.16 km. Adapun jumlah jalan raya yang ada di Kecamatan Dumai Selatan yaitu terdiri dari tujuh jalan. Masing-masing jalan tersebut mengalami kerusakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ringan dan berat. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi jalan raya di Kecamatan Dumai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.2 : Kondisi Jalan Raya di Kecamatan Dumai Selatan

No	Nama Jalan	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (Km)				
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
1	Jl. Bukit Timah	14.41	2.16	2.82	3.27	22.66
2	JL. Kelakap 7	13.95	1.87	1.98	2.44	20.24
3	Jl. Ombak	15.33	0.95	0.94	1.06	18.28
4	Jl. Sukajadi	12.35	1.58	0.71	0.62	15.26
5	Jl. Bumi Ayu	11.42	2.04	0.93	1.13	15.52
6	Jl. Bukit Datuk Lama	16.50	1.97	1.41	2.19	22.07
7	Jl. Merdeka Baru	15.72	1.05	0.91	0.70	18.38
Total		**99.68**	**11.62**	**9.70**	**11.41**	**132.41**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, 2020.

Keterangan:

Baik : Jalan yang dilalui tidak terdapat retak-retak (c*racking*), bergelombang (c*orrugation*), dan berlubang (*pothole*).

Sedang : Jalan yang di lalui terdapat retak-retak (c*racking*).

Rusak : Jalan yang di lalui terdapat lubang-lubang (*pothole*).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jalan raya yang mengalami rusak berat yaitu sepanjang 11.41 km. Pada jalan Bukit Timah sebagai jalan umum di Kota Dumai terdapat jalan rusak yang di akibatkan oleh kendaraan bertonase besar seperti Bus, truk pembawa BBM, pasir dan sawit, sehingga pada jalan tersebut menimbulkan kerusakan yang parah sehingga masyarakat tidak bisa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menikmati jalan yang layak. Masyarakat hanya menambal jalan yang berlubang dengan bahan-bahan seadanya dengan meminta uang kepada pengguna jalan yang kemudian dibelikan krikil, tanah kuning, dan pecahan bangunan yang dirobohkan dengan harapan jalan yang berlubang tadi membahayakan pengguna jalan yang melintas.

Keadaan ini sangat di sayangkan mengingat Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas untuk memelihara jalan, Dinas Pekerjaan Umum di anggap tidak meperhatikan keselamatan masyarakat yang melintas di jalan berlubang tersebut apalagi ketika malam jalan yang berlubang tidak bisa dilihat oleh pengguna jalan dan di perparah dengan musim hujan yang membuat jalan berlubang tersebut tergenang dan membahayakan masyarakat yang melintas.

Setelah jalan Bukit Timah, truk pembawa muatan BBM, pasir dan sawit tersebut melintas pada jalan Ombak untuk menurunkan muatannya di masing-masing perusahaan yang lagi-lagi menyebabkan jalan yang dilintasi truk rusak, hal ini menjadi efek domino yang disebabkan oleh kendaraan besar.

Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum di duga lepas tangan akan masalah ini, mengingat jalan raya adalah prasarana untuk menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu, jika pemiliharaan jalan di anggap sepele maka akan menyebabkan kelangkaan sejumlah barang yang diperlukan masyarakat dan jasa pelayanan terganggu akibat jalan yang rusak tersebut.

Pada kasus kerusakan di jalan Bukit Timah sebagai pintu masuk lainnya ke Kota Dumai, kerusakan terhadap jalan tersebut bukan disebabkan oleh kendaaraan besar saja, melainkan kurangnya drainase di sepanjang jalan tersebut, sehingga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jalan tergenang air dan dapat mengakibatkan jalan rapuh, dan lama-lama menjadi berlubang. Dengan masalah drainase jalan, air di lubang jalan tersebut tidak surut sehingga membuat tanah atau pondasi jalan menjadi rapuh.

Rapuhnya pondasi mengakibatkan turunnya ketinggian jalan, sehingga jalan menjadi patah. Ketika pengendara melewati jalan tersebut akan merasakan guncangan terhadap kendaraan mereka. Jika pengendara sepeda motor tidak mengetahui adanya patahan jalan tersebut, maka akan mengakibatkan terpelantingnya pengendara motor tersebut dan menyembabkan terjadinya kecelakaan.

Sedangkan permasalahan di jalan Bukit Timah, kerusakan jalan di akibatkan adanya tempat peristirahatan para pengemudi truk bertonase besar dan tedapat pula bengkel di daerah tersebut, sehingga para pengemudi truk tersebut memakirkan kendaraannya di bahu jalan, sedangkan jalan yang dilewati pengendara truk tersebut mempunyai beban maksimal 5 ton, hal ini tentu saja syarat kendaraan yang melintasi bukan untuk parkir kendaraan bertonase besar.

Akibat dari ulah yang dilakukan supir truk tersebut menyebabkan jalan menjadi amblas. Tidak jarang truk yang parkir terperosok ke dalam parit yang berada di sisi jalan. Dalam hal ini, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, jika pengendara truk tersebut dilarang parkir di tepi jalan, maka masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang dapat mengalami kerugian, karena tidak ada yang membeli jualan mereka. Namun jika dibiarkan saja, maka akibatnya masyarakat banyak yang menanggung dan merasakan penderitaan atas jalan yang rusak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Begitu pula keadaan di jalan Kelakap 7 yang dimana truk pembawa sawit menjadikan rest area bagi mereka dengan memarkirkan kendaraan di tepi jalan. Kemudian jika dilihat di jalan Kusuma hanya memiliki kapasitas kendaraan yang lewat sangat sedikit sehingga jalan yang bisa di lewati dua arah hanya menjadi satu arah, karena disebabkan truk parkir di bahu jalan, sehingga membuat jalan jadi sempit.

Kemudian di jalan Bukit Datuk Lama dan jalan Merdeka Baru hanya mengalami kerusakan sedang yang disebabkan oleh intensitas kendaraan yang lewat cukup tinggi, sehingga jalan mengalami retak-retak. Hal ini membuat kenyamanan berkendara menjadi berkurang, apalagi jalan Sultan Syarif Kasim berada tepat di tengah kota, sehingga nilai estetika menjadi berkurang akibat retaknya jalanan tersebut.

Dari permasalahan yang terjadi terhadap jalan raya diatas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai melakukan terobosan untuk membeton jalan yang rusak, namun ada beberapa kelebihan dan kekurangannya, diantaranya yaitu:

1) Kelebihan :
    a. Beton sangat keras sehingga mampu menahan beban yang sangat besar.
    b. Beton tahan akan cuaca panas saat musim kemarau dan hujan
    c. Karena beton sangat kuat sehingga tidak memerlukan perawatan yang intens.
    d. Beton sangat cocok di tanah yang kurang stabil tanpa harus melakukan pengerasan.
2) Kekurangan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Harga yang terlalu mahal dalam pembuatannya.
b. Warna beton cendurung monoton sehingga menimbulkan rasa kantuk .
c. Suhu beton sangat panas sehingga ban kendaraan cepat aus dan hal tersebu menjadi musuh pegendara truk.
d. Jalan beton acap kali tidak dibangun dengan drainase sepanjang jalan.

Pada dasanya apapun jenis jalan yang akan di bangun, jika dalam pemiliharaannya tidak dilakukan secara maksimal dan disiplin, maka akan menjadi hal yang sia-sia belaka, ditambah lagi dengan biaya pembangunan jalan yang sangat mahal, maka hal ini tidak sejalan dengan konsep efesiensi terhadap anggaran yang dikeluarkan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, adapun beberapa fenomena permasalahan mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, antara lain:

1. Terindikasi bahwa banyaknya kendaraan besar yang sering melewati jalan raya di Kecamatan Dumai Selatan seperti Bus, Truk pengangkut BBM, pasir, batu, sawit dan lainnya, sehingga menyebabkan jalanan menjadi rusak seperti amblas, retak, dan bahkan berlubang.
2. Terindikasi bahwa kerusakan jalan di akibatkan adanya tempat peristirahatan para pengemudi truk bertonase besar dan tedapat pula bengkel di daerah tersebut, sehingga para pengemudi truk tersebut memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, sedangkan jalan yang dilewati pengendara truk tersebut mempunyai beban maksimal 5 ton, akibatnya jalan menjadi amblas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai di duga lepas tangan terhadap masalah jalanan yang rusak, padahal Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan. Maka dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum di anggap tidak memperhatikan keselamatan masyarakat yang melintas di jalan rusak tersebut (bergelombang, retak, berlubang). Apalagi ketika pada malam hari, jalan yang berlubang tidak bisa dilihat oleh masyarakat yang melintas, serta diperparah dengan musim hujan yang membuat jalan berlubang tersebut tergenang air, sehingga membahayakan masyarakat yang berkendara.
4. Ada dugaan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai tidak melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mencegah terjadinya kerusakan jalan. Padahal Dinas Perhubungan dapat melakukan pengamanan terhadap truk-truk bertonase besar yang bermuatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan, serta pengamanan terhadap truk-truk yang parkir di bahu jalan.

Berdasarkan dari beberapa fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **"Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai".**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian yang terdapat pada latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai?
2. Apa saja faktor penghambat Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ilmu Pemerintahan yang di pelajari dalam dunia perkuliahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Manfaat praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan.
3. Manfaat akademis, sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahaan adalah suatu ilmu dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur Dinas. Berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara Dina situ dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintah adalah segalaa daya segala upaya suatu Negara untuk mencapai tujuannya. (Musanef, 2002;a8).

Sedangkan pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembaangunan dan pemerintahan di harapkan dapat terlaksanadengan kualitas daan kemampuan dari penyelenggara tersebut,selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakaan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dan tugas paemerintahan umum yang ada. (Musanef, 2002:15).

Dalam penyelenggaraan pemaerintahan, setidaknya ada tujuh (7) tugas pokok pemerintah menurut Rasyid (2007:11-13), yakni :

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidaak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemearintah yang sah melalui cara-cara kekerasan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Memelihara ketertiban dengan amencegah terjadinya gontok-gontokan diantara masyarakat, menjaminaa agar perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsuang secara damai;
3. Menjamin diterapkannya perlakuana yang adil kepada masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakanginya;
4. Melakukan perkerjaan umum dan maember pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembagaa non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningakatkan kesejahteraan social;
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntunagkan masyarakat luas;a
7. Menearapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkuangan hidup;

Tujuh tugaas pokok diatas mempelihatkan adanya jangkauan tugas yang luas dan kompleks adengan tanggung jawab yang berat dipikul oleh pemerintah. Khusus dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemerintah terutama aparatur pemerintahaan perlu mempedomani maksud dari suatu pelayanan.

Pemerintahan adalam paradigma lima memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan aberorientasi pada kekuasaan namun dalam paradigma baru pemerintahan dipanadang memiliki objek material masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebaagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemeraintahan/Negara (Yusri Munaf, 2016;47). Sejalan dengan hal tersebut, dapat juaga di jelaskan bahwa fungsi bersifat objektif

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sedangkan tugas bersifat subjekatif. Adapun fungsi pemerintahan ada 3 (tiga) adalah :

a. Fungsi pembangunan
b. Fungsi pemberdayaan, dan
c. Faungsi pelayanan.

Definisi Pemerintahan menurut Rosenthal yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh JRG Djopari yang kemudian di tulis kemballi oleh Syafie yang mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengenali studi tentang kianerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dalam proses pemerintahan.

Sedaangkan pemerintahan adalah segala daya upaya Negara atau wilayah untuk mencaapai tujuannya. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan paembangunan dan pemerintahan di harapkan dapat terlaksana dengan kualitaas dan kemampuan dan penyelenggaraan tersebut sekalin pelaksanaan tugaas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga amelaksanakan tugas umum pemerintahan yang merupakan sebagai pendukunga dari tugas pemerintahan umum yan ada.

Menurut Hutama (2009;11) Ilmu pemerintahan merupakan ilmu terapan karena mengutamakaan segi penggunaan dalam praktek,yaitu dalam hal hubungan antara yang memerintah (penguasa) dan dengan yang di perintah (rakyat).

Sedangkan maenurut Ndraha (2003;7) mendefinisikan ilmu pemerinthan sebagai ilmu yang meampelajari bagaimana pemerintah (Unit kerja Publik) bekerja memenuhi dan maelindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang di perintah akan jasa publik daan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selama ini pemerintahan dijaalankan belum dilaksanakannya secara maksimal, dikarenakan kinerja aparat amasih lemah ,secara subjektif,menurut Rasyid (1997;48), tugas pemerintahan daibagi dalam 3 fungsi pokok yaitu :

a. Pelayanan (Service)
b. Pemberdayaan (empraowerment)
c. Pembangunan (Develoapment)

Ketiga fungsi pemerintahan di atas memiliki keterkaitan satu sama lainnya, yakni :

1. Fungsi pelaayanan akan mendorong keadilan dalam masyarakat
2. Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masayrakat
3. Fungsi pembangunan akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.

Pemerintahan agara dapat mewujudnya kesejahteraan umum sebagai tujuan Negara perlu melakaukan upaya-upaya, di antara dengan mengeluarkan kebijakan kebijakan untuka mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan Negara dapaat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintaha yang berarti peraturan yang amengatur aspek kehidupan masyarakat, Negara di harapkan apa yang menjadi tujaaan dari penyealenggaraan Negara yang dicapai.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Keberadaan pemerintahaan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas meanyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah aprovinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-atiap parovinsi, kabupaten,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yanga diatur denagan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Unadang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimakssud dengan pemerintaahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintaahan oleh pemerintaha daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas paembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negaraa Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negaraa Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pengertian tersebut ada beberapa kata kuncai yang perlu kalian pahami, yaitu:

1) aPenyelenggaraan urusan pemerintahan Urusan pemerintahan yang daiselenggarakan oleh pemerintahan daerah mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang menjadi kewenangan peamerintah pusat, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, peratahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.
2) Pemaerintah daerah dan DPRD Pemerintah daerah dan DPRD merupakan unsura penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan yang asejajar. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Daeraha berkedudukan sebagai lembaga eksekutif di daerah yang terdiri atas kepala daaerah/wakil kepala daerah dan perangkat daerah, sedangkan DPRD berkedudaukan sebagai lembaga legislatif di daerah yang anggotanya dipilih melalui paemilihan umum. Pemerintahan daerah memiliki dua tingkatan, yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1). Paemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah praovinsi (Gubernur/Wakil Gubernur dan perangkat daerah provinsi) dan DPRD Provinsi.

2). Pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walkota/Wakil Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota) dan DPRD Kaabupaten/Kota.

Dengan akata lain hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah itu bersifat hierarkis. Begitu pula hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahana kabupaten/kota juga bersifat hierarkis.

Dengan kataa lain pemerintah pusat memiliki kedudukan dan keweanangan yang lebih tinggia dibandingkan pemerintahan provinsi dan pemeraintahan kabupaten/ kota, peamerintahan provinsi memiliki kedudukan dan keweanangan yang lebih tinggi dibaandingkan dengan pemerintahan kabupaten/kota.

3. Konsep Organisasi

Menurut pendapat Moekijat (2005:6) organisasi adalah kerangka didalam dimana orang-orang bertindak dan organisasi mengandung pengertian adalah penyusunan tenaga kerja dan pembagian tugas-tugas. Mengorganisasikan adalah menyusun bagian-bagian sedemikian rupa sehingga seluruhnya bekerja sebagai suatu badan yang di satukan.

Kelangsungan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencapai suatu usaha sebagaimana yang tidak terlepas dari adanya peranan dari segenap anggota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

organisasi yang mampu melaksanakan tugasnya sehingga dapat dikatakan bahwa anggota organisasi adalah sumber daya manusia agar dapat mendukung sebuah kelangsungan organisasi.

Organisasi merupakan suatu kegiatan yang memiliki sifat kerja sama agar mencapai tujuan tertentu yang dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan organisasi dapat terbentuk persirakatan manusia agar tercapainya efektivitas pelaksanaan tugas sebagai bidang organisasi tentunya tidak terlepas dari proses pengorganisasian.

Seorang pemimpin ditingkat organisasi apapun dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian yang khusus perananorganisasi tertentu sangat penting guna menerapkan kemampuan dan keterampilan seseorang administrator. Segala keberhasilan manusia dalam berabagai bidang kehidupan dapat dicapai melalui organisasi dan bantuan orang lain.

Manusia tidak akan dapat mewujutkan impian, cita-cita dan tujuan hidupnya. Ketergantungan pada orang lain inilah yang mendorong manusia untuk selalu dan senantiasa bekerjasama atau berorganisasi, inilah yang menyebabkan maju mundurnya kehidupan manusia, terwujudnya cita-cita manusia tersebut tergantung pada kemampuan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi, termasuk sumber daya manusia yang lebih efisien, efektif dan produktif.

Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam pencapaian tujuan tetentu atau dengan bahasa lain, organisasi sebagai sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tetentu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan berupaya dalam mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. (Sule dan Saefullah, 2004:4).

Menurut Wendrich (dalam Brantas, 2009:75) organisasi adalah proses mendesain kegiatan-kegiatan dalam struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sutarno (dalam Brantas 2009:75) organisasi adalah kumpulan orang, proses pembagian kerja, dan sistem kerja sama atau sistem sosial.

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokkan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai macam aktivitas bagi pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan komitmen tertentu.

Ada begitu banyak para ahli yang memberikan pendapat mereka tentang organisasi. Salah satunya adalah Siagian (2003;6) yang menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah salah satu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukung.

4. Konsep Manajemen dan Manajemen Pemerintahan

Manajemen menurut George R. Terry (dalam Danang, 2012:2) diartikan sebagai kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi yang dapat ditentukan terlebih dahulu dengan bantuan dari orang lain, agar dapat menjalankan organsasi secara teratur.

Jhon M. Pfifner (dalam Danang, 2012:2) manajemen yaitu mengharuskan seseorang melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan agar mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Kemudian menurut Stoner dan Freeman (dalam Danang, 2012:2) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi agar tercapainya tujuan organisasi yang telah di tetapkan.

Sementara itu, Hasibuan (2006:2) mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mecapai tujuan tertentu.

Selanjutnya Supriyanto (2009:27) mengatakan bahwa manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tentukan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Manajemen pemerintahan muncul dari berbagai fungsi pemerintahan dalam rangka melaksanakan pemerintahan untuk kepentingan rakyatnya sesuai fungsi negara. Fungsi Negara menurut Borre dan Goldsmith dalam Supriyanto (2009:45-46) adalah :

1. Berkaitan dengan pertanahan yakni melindungi dan mengembangkan wilayah negara.
2. Berkaitan dengan keamanan internal, yakni penegak hukum.
3. Peningkatan kesejahteraan penduduk, pemeliharaan legistimasi ideology dan simbolik.

Sedangkan fungsi manajemen pemerintah menurut Supriyanto (2009:46) dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Manajemen paemerintah berarti membuat keputusan-keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi tentang tata kelola pemeriantahan, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
2. Manajemen peamerintahan berati membuat kebijakan-kebijakan tentang hubungan yanga mengikat antara pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintaah daerah
3. Manajemen pemeraintah berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan pengusaha untuk menigkatkan kesejahtaeraan rakyat
4. Manajemen pemerinatahan berarti menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Manajemen pemerintahaan berarti melaksanakan kekuasaan pemerintah baik sebagai pimpinan naegara pemerintahan maupun lembaga-lembaga tinggi negara
6. Manajemen paemerintah berarti melaksanakan pertanggung jawaban penggunaan angagaran secara berkala
7. Manajemen peamerintahan berarti melaksanakan LAKIP (laporan akuntabilitas kinearja instasi pemerintah) setiap akhir tahun anggaran
8. Manajemen pemearintahan mengharuskan pelaksaanaan program dan kegiatan yang telah adirencanakan
9. Manajemen pemerinatahan berarti menentukan standar pelayanan yang wajib dilaksanakan diabidang tata kelola pemerintahan
10. Manajemen pemerintaahan berarti menetapkan kinerja penentuan dan perubahan tata kelola
11. Manajemen pemerintaahan berarti menyusun rencana nasional secara makro bidang tata kelola pemeritahan
12. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan persyaratan jabatan bagi calon yang akan menempati jabatan dibidang pemerintahan
13. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan bimbingan dan mengontrol atas penyelenggaraan otomi derah yang meliputi kelembagaan pemberian pedoman/bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi bidang tata kelola pemerintahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

14. Manajemen pemerintahan merupakan penganturan penetapan perjanjian atau persetujuaan internasional yang di sahkan atas nama negara bidang tata kelola pemaerintahan
15. Manajemen pemaerintahan seperti pelayanan standar pemberian izin untuk investorat
16. Manajemen pemerintahan berarti pengaturan sistem kelembagaan perekonomian negara
17. Manajemen pemerintahan berarti penyelesaian perselisihan antar provinsi di bidang aadministrasi atau perbatasan daerah
18. Manajemean pemerintahan memiliki arti untuk menetapkan arahan agar dapat melaaksanakan pengawasan yang berada pada bidang tata kelola pemerintahaan
19. Manajemen pemerintahan berarti penyelenggaraan hubungan kerja dibidaang tata kelola pemerintahan antar instansi.

5. Konsep Koordinasi

Menurut Ismail Solihin (2009: 91), karaateristik pertama dari organisasi adalah adanya koordinasi upaya dari sumber dayaa manusia yang terlibat dalam organisasi. Penggabungan yang terkoordinasi deangan baik akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan upaya paerseorangan.

Hasibuan (2009 : 85) berpendapat bahwa : “koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinaasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalaam mencapai tujuan organisasi”.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menuarut Yohanes Yahya (2006 : 95), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untauk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menuruat Handoko (2003 : 195), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan adan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemena-depaartemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapaai tujuan secara efesien dan efektif.

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2009 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waaktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yaang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut aManullang (2008: 72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh aunit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungakin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya kooardinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam meancapai tujuan organisasi.

Sutisna (1989) medefinisikan koordinasi ialah proses mempersatukan sumbangan-sumbangana dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain kearah tercapainya maksud-makasud yang telah ditetapkan.

Anonim (2003) maendefinisikan koordinasi ialah suatu sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan kesederhanaan berbagai kegiatan inter dan antaar institusi-institusi di masyarakat melalui komunikasi dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dialog-dialog antar bearbagai individu dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan teknoloagi informasi.

Berdasarkan pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan koordinasi aaialah proses mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan, dan amenyederhanakan pelaksanakan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus auntuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya menurut Richard L. Daft (2011 : 30) koordinasi (*coordination*) mengacu pada kualitas kolaaborasi di antara departemen. Menurut Manullang (2008:72), koordinasi dapat adilakukan dengan berbagai cara. Empat cara utama dalam usaha memelihara kooradinasi adalah sebagai berikut:

1) Mengadakan pertemuaan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan. Dalama pertemuan seperti ini, dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dari apihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai suatu tujuan.a
2) Menganagkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugasa melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, seperti memberi penjelasaan atau bimbingan kepada unit-unit yang dikoordinasikan.
3) Membuat abuku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unita. Buku pedoman seperti itu diberikan kepada setiap unituntuk dipedomani aaadalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4) Pimpinan ataau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan bawahannya daalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi, dan pengarahan.

Melakukan kegiaatan koordinasi dengan berbagai cara seperti tersebut diatas adalah amat perlu asebab adanya kegiatan koordinasi dapat menghindarkan terjadi konflik menguraangi duplikasi tugas, meniadakan pengangguran, melenyapkan kepentingana unit sendiri dan memperkukuh kerja sama. Dengan setiap koordinasi diharapkaan akan tercipta suasana kerja sama, kesatuan tindakan dan kesatuan tujuan akhir.

6. Konsep Kinerja

Meanurut Bacal (2004:39) Kinerja merupakan tingkat kontribusi yang diberikan pegawai terhadap tujuan pekerjaannya atau unit kerja dan organisasi sebagai hasil perilakunya dan aplikasi dari keterampilan, kemampuan, dan pengetahuannya.

Mahsun (2013:25) mengungkapkan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *stategic planning* suatu organisasi.

Sedangkan menurut Mangkunegara (2009;67) Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Indikator untuk menilai kinerja menurut Mangkunegara (2009;67) terdiri dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

empat macam yaitu kulaitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja mencerminkan perilaku pegawai ditempat kerja sebagai penerapan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan, yang memberikan kontribusi atau nilai terhadap tujuan organisasi.

Kinerja merupakan suatu potensi yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab yang diberikan organisasi pada pegawai. Dengan kinerja yang baik, maka setiap pegawai dapat menyelesaikan segala beban organisasi dengan efektif dan efisien sehingga masalah yang terjadi pada organisasi dapat teratasi dengan baik. Kinerja menjadi landasan yang sesungguhnya dalam suatu organisasi karena jika tidak ada kinerja maka tujuan organisasi tidak dapat tercapai. Kinerja perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemimpin untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja yang ada pada organisasi.

Menurut Robbins (dalam Sedarmayanti, 2007) Kinerja adalah pelaksanaan suatu pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan yang berorientasi pada standar hasil kinerja.

Istilah kinerja berasal dari kata *performance* (pelaksanaan dari sebuah tanggungjawab) artinya suatu pekerjaan lebih ditekankan pada proses, dimana selama pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan penyempurnaan sehingga pencapaian hasil pekerjaan atau kinerja dapat dioptimalkan. Penilaian dari suatu pekerjaanmenentukan kedudukan rasio pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi (Haynes dalam Sinambela, 2012:5).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kemudian menurut Riva'i dan Basri (2005:14) kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target dan sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mencapai kinerja kelompok yaitu hubungan antara keterpaduan dengan kinerja kelompok, dan perbedaan-perbedaan antara pemecahan masalah dengan pengambilan keputusan secara individu dan kelompok.

Selanjutnya menurut Nasucha (dalam Irham Fahmi 2015:3) kinerja adalah sebuah efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.

Kemudian kinerja dijelaskan dalam *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy* tahun 2003 yaitu "kinerja menggambarkan sampai seberapa jauh organisasi tersebut mencapai hasil ketika dibandingkan dengan kinerjanya terdahulu dibandingkan dengan organisasi lain dan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan" (dalam Keban, 2004:193).

Adapun Swanson (dalam Keban, 2004:193) mengemukakan kinerja adalah mempertanyakan apakah tujuan atau misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi, politik, dan budaya yang ada serta struktur dan kebijakannya mendukung kinerja yang diinginkan. Selain itu, kinerja

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

organisasi adalah kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada organisasi dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran yang telah disepakati.

Dalam wibowo (2014;70) kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia didalam nya, tetapi juga sumber daya lainya seperti dana,bahan peralatan, teknologi dan mekanisme kerja yang berlangsung dalam organisasi.

Selanjutnya Sinambela (2012:5) juga mengungkapkan bahwa kinerja adalah kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangat dipearlukan sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberaapa jauh kemampuan pegawaai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Kinaerja pegawai harus dikelola karena tanpa penetapan beban tugas dan arahannya yang jelas pegawai tidak akaan maksimal dalam melaksanakan pekerjaananya.

Keberhasilan daari sebuah kerja merupakan suatu sasaran yang ingin didapatkan oleh individau. Namun, proses untuk mendapatkan kebaerhasilan dari sebuah pekerjaan terdapaat faktor yang bisa mempercepat atau maemperlambat dalam mencapai hasil yanag diharapkan. Faktor yang mempengaaruhi kinerja sangat penting untuk diketaahui agar pencapaian dari suatu peakerjaan bisa didapatkan.

Menurut Simanjuntak (2005) kinerja dari individu dipengarauhi oleh beberapa hal diantaranya :

a. Kualitas dan kemampuan individu. Yaitu merupakan hal yang berhubungan dengan pendidikan/paelatihan, etos kerja, motivasi kerja, dan konadisi fisik pegawai (individu). aKualitas dan kemampuan pegawai yang baik bisa didapatkan dari proseas rekrutmen yang benar dan sesuai dengana standar penerimaan pegawai serta adanya pelatihan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Sarana pendukung. Yaaitu hal yang berhubungan dengan saranaa kerja. Dengan adanya sarana kaerja dan lingkungan kerja yang baik akan maembuat kinerja dari pegawai (individu) meningkat.

Dari penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja indiavidu diatas, peneliti memaknai bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja merupakan faktor yaang dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat bagaimana kinerja peagawai (individu)a dan sangat penting untuk diketahui agar nantinya individu dalam bekerja daapat mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu untuk diperhatikan dalam pencapaian suatu pekerjaan.

Tekanik yang digunakan oleh seorang pimpinan untuk meninagkatkan kinerja adalaah melalui penilaian (*appraisal*) motivasi pegawai untuk bekerja, mngembangkaan kemampuan dimasa mendatang yang dipengaruhi oleh umpan balik mengenaai kinerja masa lalu dan pengembangannya. Penilaian maengenai kinerja digunaakan untuk membandingkan berbagai pekerjaan dengan menggunakan parosedur-prosedur formal dan sistematis untuk menentukaan suatu urutan tingkat peakerjaan tersebut (Simamora dalam Sinambela 2012:47).

Penilaian kerja (*performance appraisal*) adalah proses dimana orgaanisasi mengevaluasi pealaksanaan kerja individu. Dalam penilaian kinerja dinilai kontribusi pegawaia kepada organisasi selama periode waktu tertentau. Umpan balik dari kinerja (a*performance feedback*) memungkinkan pegawai mengetahui seberapa baik meraeka dalam bekerja. Penilaian kinerja secara kaeseluruhan merupakan proses yaang berbeda dari evaluasi kerja (*job evaluation*). Penilaian kinerja berkenaan deangan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diberikan. Evaluasi keraja menentukan seberapa tinggi harga sebuaha pekerjaan bagi organisasi (Sinambeala, 2012:47).

Penilaian kinerja aadalah sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa orang-orang pada setiap tiangkatan mengerjakan tugas-tugas menuruta cara yanh diinginkan oleh atasan meraeka. Penilaian kinerja juga merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuak menentukan hasil yang adil baerdasarkan tingkat pekerjaan dan tingkat prestasia (Rao dalam Sinambela, 1996:1).

Berdasarkan pendapata diatas dapat dimaknai bahwa penilaian kinerja adalah suatu evaluasi dari prosaes kerja yang dilaksanakan yang berkaitan dengan standar dari pekerjaan yang tealah ditentukan. Suatu pekerjaaan harus dilakukan evaluasi agar dapat mengetahui aseberapa besar pencapaian dari pekerjaan tersebut telah dilakukan.

Metode penilaian kinerja menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat bagus tidaknya penilaiana kinerja yang dilakukan akan dipenagaruhi oleh tepat tidaknya metode penilaiana yang dipilih dan diimplementasikan. Penilaian kinerja merupakan bagian dari funagsi manajemen yang sangat penting, suatu organisasi merancang program penilaaian kinerja untuk memberikan informasi terkait pencapian dari kinerja.a

Tujuan dari peanilaian kinerja menurut Cumming dan Donald (dalam Sinambela, 2012:61) adaalah :

a. Untuk mencapai suaatu kesimpulan yang evaluative atau yang memberi pertimbangan mengeanai kinerja pegawai.
b. Untuk mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan.
c. Untuk pengembangana berbagai karya lewat progam-program yang talah dilaksanakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Sastraohadiwiryo (2003:233) penilaian kinerja dilakukan dengan tujuan sebagai :

a. Sumber adata untuk perencanaan ketenagakerjaan dan kegiatan pengembanagan jangka panjang bagi perusahaan yang bersangkutaan.
b. Nasihat yanag perlu disampaikan kepada para tenaga kerja dalam perusahaan.
c. Alat untuk maemberikan umpan balik yang mendorong kearah kemajuan dan kemungkianan memperbaiki atau meningkatkan kualitas kerja bagi para tenaga kerjaa.
d. Salah satu cara auntuk menetapkan kinerja yang diharapkan dari seorang pemegang tugas daan pekerjaan.
e. Landasan/bahan inaformasi dalam pengambilan keputuasan pada bidang ketenagakerjaan baiaak promosi, mutasi, maupun kegiatan ketenagakerjaan lainnya.
f. Standar dalam penentuan tinggi rendahnya kompensasi saerta administrasi bagi tenaga kerja.

Berdasarkan penjelasan diaatas, dapat dimaknai bahwa tujuan dari penilaian kinerja adalah sebagaiaa landasan atau bahan ianformasi dalam pengambilan keputusan pada bidaang ketenagakerjaan dan sebagai bahan pengembangan bagi instansi yang bersaangkutan.

B. Penelitian Terdahulu

Megaria Elisabeth P (2012). “Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba Samosir Terhadap Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabuapten Toba Samosir”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga indikator kinerja yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, terdapat dua indikator yang kurang baik dalam hal pemeliharaan jalan dan jembatan, yaitu indikator responsivitas dan akuntabilitas.

Yohanes F.C. Ransun (2017). “Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Daerah”. Hasil penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam pemeliharaan jalan masih buruk dan dalam pemeliharaan jalannya terkesan hanya asal-asalan saja.

Choirul Ikhwan & Suswanta (2017). "Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Waringin Barat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Daerah Tahun 2016". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan sudah dilakukan dengan baik dan sesuai keinginan, hanya saja kualitas pelayanan dinas PU dalam pembangunan jalan dari tanah ke aspal berjalan lamban.

Dhita Flafiya Indriyani (2018). "Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pelayanan Publik Terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah (Studi Kasus Kerusakan Jalan)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini ditunjukkan dengan masih kerap ditemukannya kerusakan jalan dari kerusakan ringan sampai kerusakan jalan berat pada ruas-ruas jalan di Kabupaten Tulang Bawang.

Delvita Rani (2019). "Kinerja Bidang Bina Marga Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru masih belum sesuai dengan yang diharapkan atau belum menjalankan tugas secara keseluruhan. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan anggaran, SDM dan sarana prasarana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Penelitian ini lebih memfokuskan kearah bagaimana cara Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan, kemudian apa saja langkah-langkah yang diambil dalam menangani jalan yang rusak, serta apa saja faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka kerangka pikiran merupakan kajian kepustakaan sebagai jawaban teoritis, adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah kinerja. Maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar II.1 : Bagan Kerangka Pikir Penelitian Tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai



Sumber : Olahan Penulis, 2020.

D. Konsep Operasional

Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, diantaranya yaitu :

1. Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Kota Dumai yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.
2. Dinas Pekerjaan Umun adalah organisasi perangkat daerah atau unsur pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pembangunan pada sektor jalan raya dan sejenisnya.
3. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
4. Kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran organisasi dengan baik dan berdaya guna.
5. Kuantitas kerja adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam satu periode tertentu.
6. Pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dalam rangka menjalankan tugas yang telah diberikan kepada seseorang tersebut dan dituntut untuk melakukannya hingga selesai.
7. Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya tepat pada waktunya dan berani mengambil resiko atas keputusan yang dibuatnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8. Jalan adalah sarana yang bisa dilintasi kendaraan bermotor untuk menghubungkan satu kawasan ke kawasan lainnya.
9. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan strategis nasional, serta jalan tol.
10. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam system jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
11. Jalan kabupaten/kota adalah jalan lokal dalam system jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan strategis kabupaten.
12. Jalan nasional merupakan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jalan provinsi merupakan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dan jalan kabupaten/kota merupakan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

Konsep	Variabel	Indikator	Item Yang Dinilai	Skala Pengukuran
Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Anwar Prabu Mangkunegara (2009;67)	Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai	1. Kualitas Kerja	a. Keterampilan pegawai dalam bekerja b. Antusiasme pegawai dalam bekerja	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Kuantitas Kerja	a. Kecepatan dalam menyelesaikan tugas b. Produktivitas pegawai dalam bekerja	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. Pelaksanaan Tugas	a. Melayani masyarakat dengan baik b. Pelaksanaan koordinasi antar intansi	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		4. Tanggung Jawab	a. Kedisiplinan pegawai dalam bekerja b. Hasil kerja pegawai	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : Baik, Cukup Baik, dan yang terakhir adalah Kurang Baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Untuk lebih jelasnya tentang kategori ukuran tersebut akan diuraikan dibawah ini :

- **Ukuran Variabel**

Baik	:	Apabila penilaian terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai berada pada skala 67-100%
Cukup Baik	:	Apabila penilaian terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai berada pada skala 34-66%
Kurang Baik	:	Apabila penilaian terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai berada pada skala 0-33%

- **Ukuran Indikator Variabel**

1. Kualitas Kerja

Baik	:	Apabila penilaian terhadap indikator Kualitas Kerja berada pada skala 67-100%
Cukup Baik	:	Apabila penilaian terhadap indikator Kualitas Kerja berada pada skala 34-66%
Kurang Baik	:	Apabila penilaian terhadap indikator Kualitas Kerja berada pada skala 0-33%

2. Kuantitas Kerja

Baik	:	Apabila penilaian terhadap indikator Kuantitas Kerja berada pada skala 67-100%
Cukup Baik	:	Apabila penilaian terhadap indikator Kuantitas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kerja berada pada skala 34-66%

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Kuantitas Kerja berada pada skala 0-33%

3. Pelaksanaan Tugas

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Tugas berada pada skala 67-100%

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Tugas berada pada skala 34-66%

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Tugas berada pada skala 0-33%

4. Tanggung Jawab

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Tanggung Jawab berada pada skala 67-100%

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Tanggung Jawab berada pada skala 34-66%

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Tanggung Jawab berada pada skala 0-33%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif, dengan metode kuantitatif. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, serta dengan jenis pengumpulan data menggunakan teknik angket/kuisioner. Metode kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2009:72).

Peneliti menggunakan metode kuantitatif karena ingin mengkaji lebih mendalam mengenai gejala, peristiwa dan kajian dalam lingkungan yang alami dalam populasi dan sampel penelitian. Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung penelitian ini, penulis menggunakan metode angket. Prosedur pemecahan masalah yang diteliti menggunakan data-data yang dikumpulkan dari objek penelitian pada saat penulis mengumpulkan data dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Pemerintahan Kota Dumai yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai selaku instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan pembuatan jalan dan pemeliharaan jalan yang berada di Kecamatan Dumai Selatan. Adapun alasan memilih lokasi ini dikarenakan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai masih kurang baik dan belum maksimal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009:73). Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas PU, Sekretaris, Kabid, dan Pengguna Jalan Raya di Kecamatan Dumai Selatan.

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya maka peneliti dapat menggunakan sebagian sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2009:73). Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 33 orang.

Table III.1: Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan Di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

No	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	1	1	100%
2.	Sekretaris	1	1	100%
3.	Kepala Bidang Bina Marga	1	1	100%
4.	Pengguna Jalan Raya Dumai Selatan	~	30	-
Jumlah		**-**	**33**	**-**

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *Insidental Sampling*, dimana menurut Sugiyono (2009:96) *Insidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Dan sampel ditentukan minimal 30 orang berdasarkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

teori *Insidental Sampling* menurut Sugiyono (2009:96) bahwa untuk penelitian kuantitatif, sampel minimal 30 orang.

Teknik penarikan *Insidental Sampling* ini ditunjukkan untuk Pengguna Jalan Raya. Jadi peneliti menggunakan teknik kuisioner terhadap Pengguna Jalan Raya dalam mengumpulkan data. Selanjutnya untuk Kepala Dinas PU, Sekretaris, Kabid, peneliti menggunakan teknik sensus dalam menentukan sampel, yakni seluruh populasi dijadikan sampel, kemudian menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang baik serta keterangan-keterangan dan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau diperoleh melalui kegiatan peneliti turun langsung kelapangan/lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu langsung mewawancarai responden yang bersangkutan. Sehingga diperoleh data, informasi serta keterangan mengenai penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data dan informasi serta keterangan yang relevan dari organisasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai. Data sekunder ini diperoleh dari Dinas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekerjaan Umum, baik dari dokumen resmi yang diberikan oleh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum seperti arsip literature berupa struktur organisasi, maupun informasi atau keterangan yang telah dipublikasikan atau ditempelkan di papan atau dinding informasi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis dara yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

2. Kuisioner / Angket

Kuisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebar daftar pertanyaan untuk diisi oleh sejumlah respaonden (Narimawati, 2007:64). Pengumpulan data untuk penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan angket atau kuisioner.

3. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan daata dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknika ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih absah, jelas dan akurat serta aktual. Dan kemudian teknik ini juga sangat bermanfaat jika ditaerapkan pada informan atau responden yang dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh penelitian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunaakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah maomen baik foto, video maupun rekaman atau media lain.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikaasikan sesuai dengan kebutuhan analisa. Selanjutnya dianalisis secara kuantitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan adilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulanya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Dumai

Kota Dumai merupakan sebuah kota yang bearada di pesisir Pantai Timur Sumatera yang menghadap ke arah Selat Malaka yang merupakan salah satu lintas pelayaran tersibuk didunia dan merupakan wilayah hinaterland dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IaMS-GT) dan kawasan segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

Dengan kondisi geografis tersebut menjadiakan Kota Dumai menjadi sangat perekonomian strategis dan berada pada jalura lintas perdagaangan dunia. Tercatat dalam sejarah pada awalnya Dumai merupakaan sebuah dusuan kecil yang dihuni para nelayan yang selanjutnya berkembang menjadi sebuah desa. Kemudian pada tahun 1959 status Pemerintah Duamai ditingkatkan amenjadi sebuah kecamatan yang berada dibawah Kabupatena Bengkalis. Sampaai tahun 1963, Dumai disebut sebagai Ibu Kota Kawedanan Duamai.

Pada tahun 1979 Kecamatan Dumai ditingkatkan staatus Pemerintahaannya menjadi Kota Administratif dengan Peraturan Pemerintaaha Republik Inadonesia No. 08 tahun 1979 tanggal 11 april 1979 (merupakan kota aadministratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaaten Daerah Tingakat (Dati) II Bengkalis. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan daan paembangunan Dumai, berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 1999 (Lembarana Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

38a29) Tanaggal 20 April 1999 Kota Administratif Dumai ditingkatkan menjadi Kotaamadya Daaerah Tingkat II.

Pada awal terbentuknya, Kota Dumai terdiri dari tigaa Kecamatan, yaitu Kecamaatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamaatan Bukit Kapur, dengan 13 (tiga belas) Keluraahan dan 9 (sembilan) Desa dengan ajumlah penduduk 15.669 Jiwa dengan tingkat kepadatan 83.85 Jiwa/Km2.a

Filosofis dasar peningkatan status pengelolaan wilayaah administrasi pemerintahan adalah memperpendeka rentang kendali, dan mempaercepat tingkat pelayanan serta memperbesar peran aserta masyarakat dalam peanyelenggaraan pemerintahan, pengelolan pembanguanan dan pemberdayaana masyarakat, disamping menangkap peluang peangembangan ekonomi yang sangaat menjanjikan.a

Seiringa perkembangan politik di Indonesia, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 maaka Kotamadya Dumai berubah menjaadi Kota Dumai. Masa jabatan Walikota aDumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan haari ulang tahun Kota Dumai. Kemudian dengan semakin berkembangnya jumalah penduduk dan semakin tingginyaa tuntutan peningkatan pelayanan yang harusa diberikan kepada masyarakat, pada tahun 2001 Kota Dumai memekarkan duaa (2) kecamatan baru yaitu: Kecaamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai aSembilan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Kapur.a

Hal inia diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Koata Dumai No. 18 tahun 2001 tentang paembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kampai. Dengaan demikian saat Kota Dumai terdiri daari lima (5) kecamatan yaitu: Kecamataan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sunagai Sembilan. Hingga saat ini melalui Paeraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2009 Kota Dumai telah memiliki tujuh (7)a kecamatan dan tiga puluh tiga (33) kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

1) Kecamatan Daumai Kota, terdiri dari 5 (lima) Keluraahan yaitu: Kelurahan Dumai Kota, aKelurahan Sukajadi, Kelurahan Bintan, Kelurahan Rimba Sekampung, daan Kelurahan Laksamana.
2) Kecamatan Meadang Kampai, terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu: Kelurahan Pelintaing, Kelurahan Guntung, Kelurahan Teluk Maakmur, dan Kelurahan Mundaam.
3) Kecamatan Dumaai Barat, terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu: Kelurahan Simpanag Tetap Darul Ihsan, Kelurahan Pangkala Sesai, Kelurahan Purnama, adan Kelurahan Bagan Keladi.
4) Kecamatan Dumai aSelatan, terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu: Kelurahan Bumi Ayu,a Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Taimah 4. Kelurahan Ratu Sima 5a. Kelurahan Mekar Sari.
5) Kecamatan Dumai Timuar, terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu: Kelurahan Tanjung Palas, Kaelurahan Jaya Mukti, Kelurahaan Bukit Batrem, Kelurahan Teluk Binjai,a dan Kelurahan Buluh Kasap.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6) Kecamatan Bukit Kapur, terdiri daaari 5 (lima) Kelurahan yaitu: Kelurahan Bagan Besar, Kelurahan Kayau Kapur, Kelurahan Bukit Nenas, Kelurahan Kampung Baru, dan Kelurahaan Gurun Panjang.
7) Kecamatan Sungai Sembilan, terdiri daari 5 (lima) Kelurahaan yaitu: Kelurahan Bangsal Aceh, Kelurahan Lubauk Gaung, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kelurahan Basilam Baru, dan Kaelurahan Batu Teritip.

Laingkup wilayah Kota Dumai, daerah dengan batas berdasarkan aspek administraatif mencakup wilayah daratan seluas ± 204.674 (dua ratus empat ribu enam ratusa tujuh puluh empat) hektar, wilayah perairan seluas ± 71.393 (tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar dan wilayaah udara, serta wilayah dalaam bumi.

Sebagaai wilayah yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, menjadikan Kaota Dumai sebagai tempat tujuan bagi penduduka dari berbagai daerah lain, sehaingga tidak mengherankan apabila Kota Dumai saat ini didiami oleh beraneka raagam etnis dan suku bangsa. Sedikitnya terdapat 16 suku bangsa yang saat hidup baerdampingan dan saling berbaur satu dengan yaang lain secara damai, rukun dan haarmonis.

Dalam penyealenggaraan pemerintahan di Kota Dumai, kita telah mengenal Walikota Adaministratif yaitu Wan Dahlan Ibrahim, Drs. H. Rusli Idar, H. Fadlah Sulaiman, S.Ha., Drs. H. Azwin Yacob dan Drs. H. Zaienuddin Abdullah. Namun sejak terbaentuk Kota Dumai sampai hari ini diusianya yang ke-20 tahun , Kota Dumai teaalah dipimpin oleh 6 tokoh yang dipercayai untuk menjalankan amanah rakyat. Ke-enam tokoh tersebut adalah:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Drs. H. Zaeinuddin Abadullah, yang menjabat sebagai Walikota Dumai sejak tanggal 27 April 1999 s.d tanggal 27 April 2000.
2) Drs. H. Wan Syamsir aYus, yang menjabat sebagai Walikota dan H. Suarman AR sebagai Waaakil Walikota Dumai Priode tanggal 27 April 2000 s.d 27 April 2005.
3) Ir. H. Nasrul Effendi, aM.T., yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Walikota Dumai mulai taanggal 28 April 2005 s.d 12 Agustus 2005.
4) Drs. H. Zulkifli As, M.Si.a, yang menjabat sebagai Waalikota Dumai dan dr. H. Sunaryo menjabat saebagai Wakil Walikota Dumai periode 2005-2010 terhitung tanggal 12 Aagustus 2005 s.d 12 Agustusa 2010.
5) H. Khairul Anwar, S.H., yanag menjabat sebagai Walikota Dumai dan dr. H. Agus Widayat, M.M. maenjabat sebagai Wakil Walikota Dumai periode 2010-2015 terhitung taanggal 12 Agustus 2010 s.d 12 Agustus 2015.
6) Drs. H. Arlizman Agus, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Walikoata Dumai mulai tanggal 12 Agustus 2015 s.d 27 Pebruari 2016.
7) Drs. H. Zulkifli AS, M.Si., yang menjabat sebagai Waliakota Dumai dan Eko Suharjo, S.E. menjabat sebagai Wakil Walikota Dumai periode 2016-2021 terhitung tanggal 27 Pebruari 2017 s.d sekarang.

B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

1. Profil Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

Sebelum terbentuknya Dinas PUPR, terdapat beberapa kali perubahan nomenkelatur dan susun organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829) Tanggal 20 April 1999 Kota Administratif Dumai ditingkatkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 5 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah terbuntuklah Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Kebersihan, yang ditetapkan oleh Walikota Dumai pada saat itu yaitu H. Wan Syamsir Yus.

Kemudian pada tahun 2005, berdasarkan Peraturan daerah nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah berubahlah nomekelatur terbuntuklah Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Kebersihan menjadi terbuntuklah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Dumai.

Perubahan nomenkelatur ketiga pada tahun 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai yang ditetapkan oleh Walikota Dumai pada saat itu yaitu H. Zilkifli A.S. Perubahan keempat terjadi pada Tahun 2018, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 4 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, berubahlah nomenkelatur Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, dan nomenkelatur ini dipakai sampai saat ini.

Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bagian Kedua Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten/kota mendirikan organisasi perangkat daerah berupa Dinas Pekerjaan Umum, hal ini di perkuat dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 Bagian Keempat tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjan Umum Daerah.

Secara kelembagaan, eksisteansi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mengalami penguatan karena secara eksplisit mengemban amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Olaeh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas aPekerjaan Umum Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secaara profesional dan efektif.

Untuk memenuhi harapan tearsebut, perlu diidentifikasi bagaimana kondisi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai saat ini, bagaimana kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datanaag, dan bagaimana cara mencapai kondisi yang diinginkan dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana teknis menghadapi pekerjaan secara akumulaatif makin bertambah. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai saat ini di kepalai oleah Zulkarnain.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sebagai institusi teknis yang melaksanakan pembangunan daerah diatuntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunana dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam maelaksanakan implementasi teknis pembangunan dan sebagai faktor kunci adari pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.a

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diinginkan orgaanisasi sesuai dengan tuntutan paradigma barau pembangunan maka Dinas Pekaerjaan Umum Kota Dumai harus mempunyai visi yang handal, karena visi tersebut merupakan suatu gambaran masa depan ayang diinginkan oleh Dinas Pekaerjaan Umum Kota Dumai sebagai suatu alembaga teknis pembangunan daaerah yang mempunyai tugas dan fungsi gunaa mewujudkan prasarana dan sarana yang berhasil guna dengan memperhatikana atau menjaga lingkungan sekitaranya menuju kawasan industri yang maju dan unaggul.

2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sebagai institusi teknis yang melaksanakan pembangunan daerah dituntut untuk meningkaatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan dapat dirumuskan dsan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditaentukan oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan implemaentasi teknis pembangunan dan sebagai faktor kunci dari pencapaian atujuan-tujuan pembangunan.a

Dalam amengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan orgaanisasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru pembangunan maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai menyatakan Visi sebagai berikut: ***"Terwujudnya aPembangunan Prasarana Dan Sarana Ke PU-an Handal Berhasil Guna Serata Berwawasan Lingkungan Menuju Kawasan Industri Yang Maju Dan Unggul".***

Visi tersebut di atas adalah merupakan suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sebaagai suatu lembaga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

teknis pembangunan daerah yang mempunyai tugas adan fungsi guna mewujudkan Prasarana dan Sarana yang berhasil guna dengaan memperhatikan atau menjaga lingkungan sekitarnya menuju kawasan industari yang maju dan unggul.

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pekerjaaan Umum maka dirumuskan Misi. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumaia mengidentifikasi apa dan untuk siapa organisaasi serta produk teknis apa ayang dihasilkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum amaka dirumuskan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sebagai berikut:

1) Mewujudkan Prasarana dan Sarana ke PU-an yanag mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata deangan bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat sertaaa melibatkan seluruh stakeholder.
2) Mewujudkana lingkungan yang nyaman dan aman dicapai melalui tersedianya praasarana dasar dengan terpenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Dumai, adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mempunyai tugas pokok meraencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalian di bidaang Pekerjaan Umum sesuai kebijakan Pemerintah Daerah, serta membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang menjadi kewenangan Kota dan tugaas pembantuan dibidang pekerjaan umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mempunayai fungsi :

1) Sekretariat mempunyai tugas merencaanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia,a mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan.
2) Bidang Pengairan mempunyai tugas amerencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menayelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidanga Pengairan.
3) Bidang Bina Marga mempunyai tugas maerencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyealia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Baina Marga.
4) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas meraencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyeliaa, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Taata Ruang.
5) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas mereancanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia,a mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya.
6) Bidang Laboratorium mempunyai tugas merenacanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, amengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Laboaratorium.

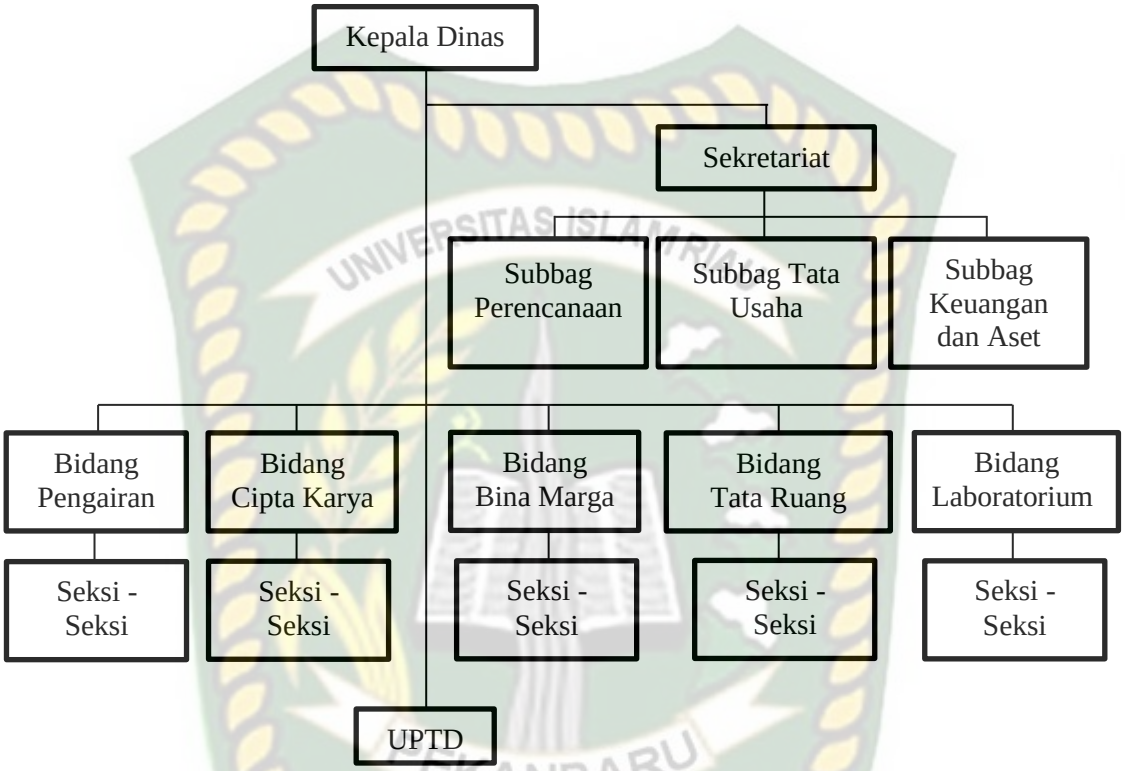
4. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

Gambar bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar IV.1: Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjan Umum Kota Dumai



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, 2021.

Berdasarkan gambar diatas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mempunyai lima bidang. Selanjuatnya adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalian dia biadang Pekerjaan Umum sesuai kebijakan Pemerintah Daerah, serta membaantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangaan Kota dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum.

Untuk menayelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mempunyai fungsi :

1) Sekretariat mempunyai tuagas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkaan pelaksanaan tugas kesekretariatan.
2) Bidang Peangairan memapunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tuagas, memberi petunjuk, menyelia, mengataur, mengevaluasi, dan melaporakan pelaksanaan tugas Bidang Pengairan.
3) Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan aoaperasionalisasi, memberi tugaas, memberi petunjuk, menyealia, mengatura, mengevaluasi, dan melaporkaan pelaksanaan tugas Bidanag Bina Marga.
4) Bidang Tata aRuang mempunyai tugas merencanakan aoperasionalisasi, memberi tugasa, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkana pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruanga.
5) Bidang Cipta Kaarya mempunyai tugas merencanakaan operasionalisasi, memberi tugas, amemberi petunjuk, menyelia, mengaatur, mengevaluasi, dan melaporkan paelaksanaan tugas Bidang Cipta Karaya.
6) Bidang Laboratorium mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, maaemberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Laboratoraium.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini adalah berjumlah 33 orang. Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat usia responden.

1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 : Distribusi Identitas Responden Dalam Penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	24	73%
2	Perempuan	9	27%
Jumlah		**33**	**100%**

Sumber : Data Penelitian, 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai terdiri dari 24 orang jenis kelamin laki-laki (73%) dan 9 orang jenis kelamin perempuan (27%). Dari uraian tersebut terlihat jenis kelamin responden di dominasi oleh laki-laki yaitu dengan persentase 73%.

2. Tingkat Pendidikan

Pada identitas responden tingkat pendidikan dalam penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai terdiri dari lima tingkat pendidikan yaitu SD, SLTP, SLTA, Diploma dan Sarjana. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan pola pikir seseorang. Adapun untuk penggolongan responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2 : Distribusi Identitas Responden Dalam Penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	SD	3	9%
2	SLTP	5	15%
3	SLTA	13	40%
4	Diploma	2	6%
5	Sarjana	10	30
Jumlah		**33**	**100%**

Sumber : Data Penelitian, 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, paling banyak berjumlah 13 orang memiliki tingkat pendidikan SLTA (40%), dan paling sedikit berjumlah 2 orang memiliki tingkat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pendidikan Diploma (6%). Dari uraian tersebut terlihat tingkat pendidikan responden di dominasi oleh lulusan SLTA yaitu dengan persentase 40%.

3. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berpikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden dalam penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.3 : Distribusi Identitas Responden Dalam Penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Responden	Persentase
1	20 – 30	8	24%
2	31 – 40	15	46%
3	41 – 50	10	30%
Jumlah		**33**	**100%**

Sumber : Data Penelitian, 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai yang berada pada usia 20-30 berjumlah 8 orang (24%), kemudian responden yang berusia 31-40 berjumlah 15 orang (46%), dan responden yang berusia 41-50 berjumlah 10 orang (30%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada usia 31-40 tahun dengan persentase 46%.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Hasil Penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai pada penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari empat indikator yang meliputi Kualitas Kerja, Kuantitas Kerja, Pelaksanaan Tugas, dan Tanggung Jawab. Hal ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.

1. Kualitas Kerja

Kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran organisasi dengan baik dan berdaya guna. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Keterampilan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan, dan Antusiasme pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden pengguna jalan yang berjumlah 30 orang mengenai indikator Kualitas Kerja terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Pengguna Jalan Mengenai Indikator Kualitas Kerja Terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Keterampilan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan	10 (33%)	14 (47%)	6 (20%)	30
2	Antusiasme pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan	12 (40%)	16 (53%)	2 (7%)	30
Jumlah		22	30	8	60
Rata-rata		11	15	4	30
Persentase		37%	50%	13%	100%

Sumber : Data Olahan 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 30 responden pengguna jalan terhadap item yang dinilai dalam indikator Kualitas kerja, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 37%, cukup baik dengan jumlah persentase 50%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 13%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dalam indikator Kualitas kerja sudah Cukup Baik dengan persentase 50%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden pengguna jalan raya Dumai Selatan Kota Dumai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sementara hasil dari wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, Sekretaris dan Kepala Bidang Bina Marga mengenai indikator Kualitas Kerja, mereka mengatakan bahwa :

> *"Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan di Kota Dumai sudah cukup baik. Setiap tahunnya kami selalu memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan terus memelihara jalanan yang masih layak pakai. Kemudian setiap tahunnya kami mempunyai target anggaran yaitu membangun jalan sepanjang 10 km, namun realisasinya mencapai 20 km setiap tahunnya. hal ini merupakan suatu prestasi bagi kami Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai karena bisa mencapai target sasaran bahkan bisa lebih. Kemudian mengenai kualitas kerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan di Kota Dumai khususnya di Kecamatan Dumai Selatan saya pikir sudah cukup baik, kami sudah melakukan kerja kami sesuai tupoksi kami, namun kami juga tetap merasa bahwa kinerja kami selaku Dinas Pekerjaan Umum masih kurang dalam melayani masyarakat terkait peningkatan kualitas jalan, hal ini karena masih ada beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan, baik itu rusak ringan maupun rusak berat".* (Wawancara : Senin, 25 Januari 2021).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Kualitas kerja, peneliti melihat bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai sudah cukup baik. Karena setiap tahunnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai selalu memperbaiki ruas jalan yang rusak dan terus memelihara jalanan yang kondisinya baik. Kemudian setiap tahunnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mempunyai target anggaran yaitu membangun jalan sepanjang 10 km, namun realisasinya bisa mencapai 20 km setiap tahunnya. Selain itu setiap tahunnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mempunyai target anggaran yaitu pemeliharaan jalan sebanyak 5 ruas, namun realisasinya bisa mencapai 25 ruas jalan setiap tahunnya Hal ini merupakan suatu kinerja yang bagus bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

karena bisa mencapai target sasaran bahkan bisa melebihi target sasaran yang telah ditentukan.

Kemudian mengenai kualitas kerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan di Kota Dumai khususnya di Kecamatan Dumai Selatan juga sudah cukup baik. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sudah melakukan pekerjaannya sesuai tupoksinya masing-masing. Namun meski demikian, pihak dinas tetap merasa bahwa kinerjanya selaku Dinas Pekerjaan Umum masih kurang dalam melayani masyarakat terkait peningkatan kualitas jalan, hal ini karena masih ada beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan, baik itu rusak ringan maupun rusak berat. Maka hal ini yang perlu menjadi pembelajaran bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai agar bisa lebih baik lagi kedepannya.

Jadi berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dalam indikator Kualitas kerja sudah Cukup Baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisioner, hasil wawancara, dan observasi lapangan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Kualitas Kerja dalam penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berada pada kategori penilaian Cukup Baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam satu periode tertentu. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Kecepatan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam menyelesaikan pengerjaan pembangunan jalan dan memperbaiki jalan yang rusak di Kecamatan Dumai Selatan, dan Produktivitas kerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden pengguna jalan yang berjumlah 30 orang mengenai indikator Kuantitas Kerja terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Pengguna Jalan Mengenai Indikator Kuantitas Kerja Terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kecepatan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam menyelesaikan pengerjaan pembangunan jalan dan memperbaiki jalan yang rusak di Kecamatan Dumai Selatan	6 (20%)	14 (47%)	10 (33%)	30
2	Produktivitas kerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan	8 (27%)	16 (53%)	6 (20%)	30
Jumlah		14	30	16	60
Rata-rata		7	15	8	30
Persentase		23%	50%	27%	100%

Sumber : Data Olahan 2021.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 30 responden pengguna jalan terhadap item yang dinilai dalam indikator Kuantitas kerja, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 23%, cukup baik dengan jumlah persentase 50%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 27%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dalam indikator Kuantitas kerja sudah Cukup Baik dengan persentase 50%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden pengguna jalan raya Dumai Selatan Kota Dumai.

Sementara hasil dari wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, Sekretaris dan Kepala Bidang Bina Marga mengenai indikator Kuantitas Kerja, mereka mengatakan bahwa :

> *"Menurut kami kuantitas kerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan di Kota Dumai khususnya di Kecamatan Dumai Selatan sudah cukup baik. Namun kami juga merasa kinerja kami kurang, karena masih ada beberapa titik yang kondisi jalannya masih rusak. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor penghambat kinerja kami dalam meningkatkan kualitas jalan di Kota Dumai yaitu keterbatasan anggaran, terbatasnya sumber daya manusia, dan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh bidang bina marga, karena yang bertugas melakukan pembangunan pemeliharaan dan perbaikan jalan adalah Bidang Bina Marga. Dari segi anggaran, beberapa tahun terakhir anggaran pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai terbatas, hal ini disebabkan oleh APBN dan APBD yang mengalami penurunan. Kemudian dari segi sumber daya manusia, Bidang Bina Marga kekurangan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas, dengan jumlah pelaksanaan pekerjaan yang cukup banyak tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bidang Bina Marga. Kemudian dari segi sarana dan prasarana penunjang kegiatan kebinamargaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Umum Kota Dumai masih belum bisa dikatakan memadai, karena jumlah peralatan yang masih minim dan tidak sebanding dengan banyaknya jalan yang ada di Kota Dumai yang membutuhkan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan kualitas jalan". (Wawancara : Senin, 25 Januari 2021).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Kuantitas kerja, peneliti melihat bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai sudah cukup baik. Adapun kuantitas atau jumlah pekerjaan jalan yang telah diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai yaitu pada tahun 2018 pembangunan jalan berjumlah 17 KM, dan pemeliharaan jalan berjumlah 25 ruas. Kemudian pada tahun 2019 pembangunan jalan berjumlah 28 KM, dan pemeliharaan jalan berjumlah 5 ruas. Dan untuk tahun 2020 pembangunan jalan berjumlah 23 KM, dan pemeliharaan jalan berjumlah 158 ruas jalan.

Namun diluar dari itu, ada beberapa hal menjadi faktor penghambat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kualitas jalan di Kota Dumai diantaranya yaitu keterbatasan anggaran, terbatasnya sumber daya manusia, dan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bidang Bina Marga, karena yang bertugas melakukan pembangunan pemeliharaan dan perbaikan jalan adalah Bidang Bina Marga.

Dari segi anggaran, beberapa tahun terakhir anggaran pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai terbatas, hal ini disebabkan oleh APBN dan APBD yang mengalami penurunan. Kemudian dari segi sumber daya manusia, Bidang Bina Marga kekurangan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas, dengan jumlah pelaksanaan pekerjaan yang cukup banyak tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bidang Bina Marga. Kemudian dari segi sarana dan prasarana penunjang kegiatan kebinamargaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai masih belum bisa dikatakan memadai, karena jumlah peralatan yang masih minim dan tidak sebanding dengan banyaknya jalan yang ada di Kota Dumai yang membutuhkan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan kualitas jalan.

Jadi berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dalam indikator Kuantitas kerja sudah Cukup Baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisioner, hasil wawancara, dan observasi lapangan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Kuantitas Kerja dalam penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berada pada kategori penilaian Cukup Baik.

3. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dalam rangka menjalankan tugas yang telah diberikan kepada seseorang tersebut dan dituntut untuk melakukannya hingga selesai.

Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sudah melayani masyarakat dengan baik dalam hal pembangunan dan perbaikan jalan, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sudah melaksanakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

koordinasi yang baik dengan intansi lain dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden pengguna jalan yang berjumlah 30 orang mengenai indikator Pelaksanaan Tugas terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Pengguna Jalan Mengenai Indikator Pelaksanaan Tugas Terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sudah melayani masyarakat dengan baik dalam hal pembangunan dan perbaikan jalan	6 (20%)	12 (40%)	12 (40%)	30
2	Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sudah melaksanakan koordinasi yang baik dengan intansi lain dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan	10 (33%)	14 (47%)	6 (20%)	30
Jumlah		16	26	18	60
Rata-rata		8	13	9	30
Persentase		27%	43%	30%	100%

Sumber : Data Olahan 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 30 responden pengguna jalan terhadap item yang dinilai dalam indikator Pelaksanaan Tugas, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 27%, cukup baik dengan jumlah persentase 43% dan kurang baik dengan jumlah persentase 30%.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dalam indikator Pelaksanaan Tugas sudah Cukup Baik dengan persentase 43%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden pengguna jalan raya Dumai Selatan Kota Dumai.

Sementara hasil dari wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, Sekretaris dan Kepala Bidang Bina Marga mengenai indikator Pelaksanaan Tugas, mereka mengatakan bahwa :

> *"Bentuk pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan di Kota Dumai khususnya di Kecamatan Dumai Selatan yaitu ada skala prioritas 1 tahun dan ada skala prioritas 5 tahun. Langkah awal adalah melakukan perencanaan dalam bentuk rapat seluruh jajaran stakeholder, kemudian melakukan survey lapangan, kemudian masuk ke tahap eksekusi atau pengerjaan pembangunan, kemudian terakhir adalah tahap pengawasan, pemeliharaan dan evaluasi. Adapun yang menjadi skala prioritas 1 tahun adalah pembangunan dan pemeliharaan atau perbaikan jalan dan jembatan di lokasi-lokasi strategis atau daerah inti yang banyak dilalui oleh masyarakat yang bersifat menunjang perekonomian. Kemudian yang menjadi skala prioritas 5 tahun adalah pembangunan jalan dan jembatan yang masih terisolasi atau terbelakang. Hal ini dilakukan agar akses jalan yang dilalui masyarakat bisa menjadi mudah dan lebih luas".* (Wawancara : Senin, 25 Januari 2021).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Pelaksanaan Tugas, peneliti melihat bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan di Kota Dumai khususnya di Kecamatan Dumai Selatan yaitu ada skala prioritas 1 tahun dan ada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

skala prioritas 5 tahun. Langkah awal adalah melakukan perencanaan dalam bentuk rapat seluruh jajaran stakeholder, kemudian melakukan survey lapangan, kemudian masuk ke tahap eksekusi atau pengerjaan pembangunan, kemudian terakhir adalah tahap pengawasan, pemeliharaan dan evaluasi.

Adapun yang menjadi skala prioritas 1 tahun adalah pembangunan dan pemeliharaan serta perbaikan jalan dan jembatan di lokasi-lokasi strategis atau daerah inti yang banyak dilalui oleh masyarakat yang bersifat menunjang perekonomian masyarakat. Kegiatan perbaikan jalan dilakukan pada kerusakan jalan yang bersifat ringan seperti jalan berlubang baik kerusakan jalan berupa lubang yang berukuran kecil, sedang, maupun besar.

Kegiatan perbaikan jalan dilakukan secara per titik kerusakan, seperti misalnya penambalan jalan berlubang. Kemudian kegiatan pemeliharaan jalan berkala merupakan kegiatan yang dilakukan pada kerusakan jalan. Hanya saja keduanya memiliki perbedaan berupa target perbaikan jalannya. Jika pada perbaikan jalan mentargetkan perbaikan secara pertitik pada kerusakan jalan berupa jalan berlubang, maka pada pemeliharaan jalan berkala perbaikan dilakukan secara menyeluruh pada sepanjang jalan di ruas jalan tertentu di wilayah tertentu.

Selain itu Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai juga melakukan peningkatan ruas jalan yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas jalan dari segi pengerasan jalan. Kemudian yang menjadi skala prioritas 5 tahun adalah pembangunan jalan dan jembatan yang masih

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terisolasi atau terbelakang. Hal ini dilakukan agar akses jalan yang dilalui oleh masyarakat bisa menjadi lebih mudah dan lebih luas.

Jadi berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dalam indikator Pelaksanaan Tugas sudah Cukup Baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisioner, hasil wawancara, dan observasi lapangan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Pelaksanaan Tugas dalam penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berada pada kategori penilaian Cukup Baik.

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya tepat pada waktunya dan berani mengambil resiko atas keputusan yang dibuatnya.

Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Kedisiplinan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam bekerja meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan, dan Hasil kerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden pengguna jalan yang berjumlah 30 orang mengenai indikator Tanggung Jawab terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Pengguna Jalan Mengenai Indikator Tanggung Jawab Terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kedisiplinan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam bekerja meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan	10 (33%)	14 (47%)	6 (20%)	30
2	Hasil kerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan	12 (40%)	16 (53%)	2 (7%)	30
Jumlah		22	30	8	60
Rata-rata		11	15	4	30
Persentase		37%	50%	13%	100%

Sumber : Data Olahan 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 30 responden pengguna jalan terhadap item yang dinilai dalam indikator Tanggung Jawab, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 37%, cukup baik dengan jumlah persentase 50%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 13%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dalam indikator Tanggung Jawab sudah Cukup Baik dengan persentase 50%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden pengguna jalan raya Dumai Selatan Kota Dumai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sementara hasil dari wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, Sekretaris dan Kepala Bidang Bina Marga mengenai indikator Tanggung Jawab, mereka mengatakan bahwa :

> *"Bentuk tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan di Kota Dumai, khususnya di Kecamatan Dumai Selatan saya pikir sudah cukup baik. Selama ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai selalu bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilakukan, bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil, dan bertanggung jawab atas segala kesalahan yang diperbuat baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hal peningkatan kualitas jalan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai memiliki tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tugas tersebut karena hal ini memang sudah menjadi tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam hal pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, perbaikan jalan, dan peningkatan kualitas jalan yang ada di kota Dumai. Intinya kami terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja kami. Dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai juga sangat terbuka dalam menerima saran dan kritikan dari masyarakat, karena hal ini merupakan bahan evaluasi bagi kami agar kedepannya kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai bisa lebih baik lagi dalam meningkatkan kualitas jalan di Kota Dumai".* (Wawancara : Senin, 25 Januari 2021).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Tanggung Jawab, peneliti melihat bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai sudah cukup baik. Bentuk tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan di Kota Dumai khususnya di Kecamatan Dumai sudah cukup baik. Selama ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai selalu bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilakukan, bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil, dan bertanggung jawab atas segala kesalahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang diperbuat baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hal peningkatan kualitas jalan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai memiliki tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tugas tersebut karena hal ini memang sudah menjadi tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam hal pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, perbaikan jalan, dan peningkatan kualitas jalan yang ada di kota Dumai.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai akan terus meningkatan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai. Dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai juga sangat terbuka dalam menerima saran dan kritikan dari masyarakat, karena hal ini merupakan bahan evaluasi bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai agar kedepannya kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai bisa lebih baik lagi dalam meningkatkan kualitas jalan di Kota Dumai.

Jadi berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dalam indikator Tanggung Jawab sudah Cukup Baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisioner, hasil wawancara, dan observasi lapangan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Tanggung Jawab dalam penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berada pada kategori penilaian Cukup Baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan analisis peneliti, Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai sudah Cukup Baik. Dari segi indikator Kualitas Kerja, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai sudah cukup baik. Karena setiap tahunnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai selalu memperbaiki ruas jalan yang rusak dan terus memelihara jalanan yang kondisinya baik. Kemudian setiap tahunnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mempunyai target anggaran yaitu membangun jalan sepanjang 10 km, namun realisasinya bisa mencapai 20 km setiap tahunnya. Selain itu setiap tahunnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mempunyai target anggaran yaitu pemeliharaan jalan sebanyak 5 ruas, namun realisasinya bisa mencapai 25 ruas jalan setiap tahunnya Hal ini merupakan suatu kinerja yang bagus bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai karena bisa mencapai target sasaran bahkan bisa melebihi target sasaran yang telah ditentukan.

Kemudian mengenai kualitas kerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan di Kota Dumai khususnya di Kecamatan Dumai Selatan juga sudah cukup baik. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sudah melakukan pekerjaannya sesuai tupoksinya masing-masing. Namun meski demikian, pihak dinas tetap merasa bahwa kinerjanya selaku Dinas Pekerjaan Umum masih kurang dalam melayani masyarakat terkait peningkatan kualitas jalan, hal ini karena masih ada beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan, baik itu rusak ringan maupun rusak berat. Maka hal ini yang perlu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjadi pembelajaran bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai agar bisa lebih baik lagi kedepannya.

Kemudian dari segi indikator Kuantitas Kerja, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai juga sudah cukup baik. Adapun kuantitas atau jumlah pekerjaan jalan yang telah diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai yaitu pada tahun 2018 pembangunan jalan berjumlah 17 KM, dan pemeliharaan jalan berjumlah 25 ruas. Kemudian pada tahun 2019 pembangunan jalan berjumlah 28 KM, dan pemeliharaan jalan berjumlah 5 ruas. Dan untuk tahun 2020 pembangunan jalan berjumlah 23 KM, dan pemeliharaan jalan berjumlah 158 ruas jalan.

Namun diluar dari itu, ada beberapa hal menjadi faktor penghambat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kualitas jalan di Kota Dumai diantaranya yaitu keterbatasan anggaran, terbatasnya sumber daya manusia, dan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bidang Bina Marga, karena yang bertugas melakukan pembangunan pemeliharaan dan perbaikan jalan adalah Bidang Bina Marga.

Dari segi anggaran, beberapa tahun terakhir anggaran pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai terbatas, hal ini disebabkan oleh APBN dan APBD yang mengalami penurunan. Kemudian dari segi sumber daya manusia, Bidang Bina Marga kekurangan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas, dengan jumlah pelaksanaan pekerjaan yang cukup banyak tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bidang Bina Marga. Kemudian dari segi sarana dan prasarana penunjang kegiatan kebinamargaan pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai masih belum bisa dikatakan memadai, karena jumlah peralatan yang masih minim dan tidak sebanding dengan banyaknya jalan yang ada di Kota Dumai yang membutuhkan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan kualitas jalan.

Selanjutnya dari segi indikator Pelaksanaan Tugas, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan di Kota Dumai khususnya di Kecamatan Dumai Selatan yaitu ada skala prioritas 1 tahun dan ada skala prioritas 5 tahun. Langkah awal adalah melakukan perencanaan dalam bentuk rapat seluruh jajaran stakeholder, kemudian melakukan survey lapangan, kemudian masuk ke tahap eksekusi atau pengerjaan pembangunan, kemudian terakhir adalah tahap pengawasan, pemeliharaan dan evaluasi.

Adapun yang menjadi skala prioritas 1 tahun adalah pembangunan dan pemeliharaan serta perbaikan jalan dan jembatan di lokasi-lokasi strategis atau daerah inti yang banyak dilalui oleh masyarakat yang bersifat menunjang perekonomian masyarakat. Kegiatan perbaikan jalan dilakukan pada kerusakan jalan yang bersifat ringan seperti jalan berlubang baik kerusakan jalan berupa lubang yang berukuran kecil, sedang, maupun besar.

Kegiatan perbaikan jalan dilakukan secara per titik kerusakan, seperti misalnya penambalan jalan berlubang. Kemudian kegiatan pemeliharaan jalan berkala merupakan kegiatan yang dilakukan pada kerusakan jalan. Hanya saja

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keduanya memiliki perbedaan berupa target perbaikan jalannya. Jika pada perbaikan jalan mentargetkan perbaikan secara pertitik pada kerusakan jalan berupa jalan berlubang, maka pada pemeliharaan jalan berkala perbaikan dilakukan secara menyeluruh pada sepanjang jalan di ruas jalan tertentu di wilayah tertentu. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum juga melakukan peningkatan ruas jalan yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas jalan dari segi pengerasan jalan. Kemudian yang menjadi skala prioritas 5 tahun adalah pembangunan jalan dan jembatan yang masih terisolasi atau terbelakang. Hal ini dilakukan agar akses jalan yang dilalui oleh masyarakat bisa menjadi lebih mudah dan lebih luas.

Dan dari segi indikator Tanggung Jawab, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai juga sudah cukup baik. Bentuk tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas jalan di Kota Dumai khususnya di Kecamatan Dumai sudah cukup baik. Selama ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai selalu bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilakukan, bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil, dan bertanggung jawab atas segala kesalahan yang diperbuat baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hal peningkatan kualitas jalan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai memiliki tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tugas tersebut karena hal ini memang sudah menjadi tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam hal pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, perbaikan jalan, dan peningkatan kualitas jalan yang ada di kota Dumai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai akan terus meningkatan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai. Dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai juga sangat terbuka dalam menerima saran dan kritikan dari masyarakat, karena hal ini merupakan bahan evaluasi bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai agar kedepannya kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai bisa lebih baik lagi dalam meningkatkan kualitas jalan di Kota Dumai.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden pengguna jalan raya Dumai Selatan terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pengguna Jalan Terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kualitas Kerja	11 (37%)	15 (50%)	4 (13%)	30
2	Kuantitas Kerja	7 (23%)	15 (50%)	8 (27%)	30
3	Pelaksanaan Tugas	8 (27%)	13 (43%)	9 (30%)	30
4	Tanggung Jawab	11 (37%)	15 (50%)	4 (13%)	30
Jumlah		37	58	25	120
Rata-rata		9	15	6	30
Persentase		30%	50%	20%	100%

Sumber : Data Olahan, 2021.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari tabel rekapitulasi tanggapan pengguna jalan terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai diatas, untuk kategori penilaian Baik yaitu sebesar 30% (9 responden), untuk kategori penilaian Cukup Baik adalah sebesar 50% (15 responden), dan untuk kategori penilaian Kurang Baik adalah 20% (6 responden), dari total keseluruhan responden pengguna jalan yang berjumlah 30 orang.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dikategorikan Cukup Baik dengan total persentase sebesar 50% (15 responden). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam skala atau kategori Cukup Baik.

Sehingga berdasarkan pengumpulan data yang meliputi hasil tanggapan responden melalui kuisioner, hasil wawancara, hasil observasi peneliti dilapangan, dan hasil dokumentasi yang tertera di lampiran, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berada pada skala atau kategori penilaian Cukup Baik.

C. Faktor Penghambat Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi faktor penghambat Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai yaitu sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Dinas Pekerjaan Umum memiliki keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.
2. Banyaknya kendaraan besar yang sering melewati jalan raya di Kecamatan Dumai Selatan seperti Bus, Truk pengangkut BBM, pasir, batu, sawit dan lainnya, sehingga menyebabkan jalanan menjadi rusak seperti amblas, retak, dan bahkan berlubang.
3. Kerusakan jalan di akibatkan adanya tempat peristirahatan para pengemudi truk bertonase besar dan tedapat pula bengkel di daerah tersebut, sehingga para pengemudi truk tersebut memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, sedangkan jalan yang dilewati pengendara truk tersebut mempunyai beban maksimal 5 ton, akibatnya jalan menjadi amblas.
4. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai tidak melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mencegah terjadinya kerusakan jalan. Padahal Dinas Perhubungan dapat melakukan pengamanan terhadap truk-truk bertonase besar yang bermuatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan, serta pengamanan terhadap truk-truk yang parkir di bahu jalan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, banyak yang telah peneliti temui berdasarkan observasi langsung ke lapangan, wawancara dan kuisioner yang telah peneliti berikan kepada seluruh responden yang diperlukan dengan empat indikator yaitu Kualitas Kerja, Kuantitas Kerja, Pelaksanaan Tugas, dan Tanggung Jawab. Maka dari itu peneliti telah menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, melalui pengumpulan data yang meliputi observasi peneliti dilapangan, kuisioner pengguna jalan, wawancara Kepala Dinas, Sekretaris dan Kabid Bina Marga, dan dokumentasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai berada pada kategori penilaian Cukup Baik.
2. Faktor penghambat Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai yaitu :
    1) Dinas Pekerjaan Umum memiliki keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Banyaknya kendaraan besar yang sering melewati jalan raya di Kecamatan Dumai Selatan seperti Bus, Truk pengangkut BBM, pasir, batu, sawit dan lainnya, sehingga menyebabkan jalanan menjadi rusak seperti amblas, retak, dan bahkan berlubang.

3) Kerusakan jalan di akibatkan adanya tempat peristirahatan para pengemudi truk bertonase besar dan tedapat pula bengkel di daerah tersebut, sehingga para pengemudi truk tersebut memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, sedangkan jalan yang dilewati pengendara truk tersebut mempunyai beban maksimal 5 ton, akibatnya jalan menjadi amblas.

4) Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai tidak melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mencegah terjadinya kerusakan jalan. Padahal Dinas Perhubungan dapat melakukan pengamanan terhadap truk-truk bertonase besar yang bermuatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan, serta pengamanan terhadap truk-truk yang parkir di bahu jalan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai seharusnya menambah anggaran, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana untuk Bidang Bina Marga, sehingga kinerja pegawai bidang Bina Marga dalam meningkatkan kualitas jalan di Kota Dumai bisa lebih efektif dan efisien.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai seharusnya meningkatkan kualitas dan kekuatan jalan dengan menambah ketebalan jalan, sehingga jalanan tidak amblas dan retak ketika dilalui kendaraan besar seperti Bus, Truk pengangkut BBM, pasir, batu, sawit dan lainnya.
3. Seharusnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai melakukan kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam menertibkan kendaraan-kendaraan bertonase besar yang memakirkan kendaraannya di bahu jalan, karena kekuatan jalan hanya mempunyai beban maksimal 5 ton, akibatnya jalan menjadi amblas jika terus dibiarkan.
4. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai seharusnya melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mencegah terjadinya kerusakan jalan. Karena Dinas Perhubungan memiliki tupoksi melakukan pengamanan terhadap truk-truk bertonase besar yang bermuatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Adisubrata, Winarya Surya. 2002. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*. Yogyakarta, UPP AMP YKPN.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Awang, Azam & Wijaya Mendra. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru: Alfa Riau.

Awang, Azam. 2011. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Pekanbaru: Alfa Riau.

Badruddin, 2017. *Dasar-Dasar Manajemen.* Bandung: Penerbit Alfabeta.

Hamim, Sufian. 2013. *Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Pekanbaru: UIR Pers.

Hasibuan, Malayu. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Edisi Revisi.* Jakarta: Bumi Aksara.

Kansil, CST dan Christine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mahsun, Mohamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta.

Moehariono, 2012. *Indikator Kinerja Utama (IKU).* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Moekijat, 2005. *Pengembangan Organisasi. Cetakan Ketujuh.* Bandung: Mandar Maju.

Moenir, H.A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mulyasa, 2006. *Kinerja Pegawai Dalam Organisasi Modern*. Jakarta: Rajawali Press.

Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ndraha, Talliziduhu. 2003. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru I*. Jakarta: Rineke Cipta.

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Rahyunir Rauf, dan Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.

Riva'i, Veithzal. 2005. *Sistem Yang Tepat Menilai Kinerja Karyawan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sarundjang, S.H. 2001. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan.

Sedarmayanti, 2004. *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.

Simanjuntak, Payaman. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.

Sinambela, Poltak. Lijan. 2012. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sudarmanto, 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi Dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2017. *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang: Media Berlian.

Suyonto, Danang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: GAPS.

Syafie, Inu Kencana. 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Makasar: Refika Aditama.

Thoha, 2011. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tim Penyusun. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Penelitian*. Pekanbaru: UIR Badan Penerbit FISIPOL.

Wasistiono, Sadu. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung: IPDN Press.

Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengerganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo.

Zulkifli dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Dumai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :